



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP

KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2023



SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ORGANISASI

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, maka tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tabalong Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tabalong Tahun 2023 merupakan laporan tahun keempat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2024, berisi pertanggungjawaban Kinerja tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tabalong disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tabalong dimaksudkan sebagai sarana untuk mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam menuju terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance and clean government) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas kebersamaan dan dukungan dalam rangka selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tabalong Tahun 2023. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tabalong ini dapat menjadi sarana evaluasi dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tabalong guna peningkatan kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Tanjung, Maret 2024

BUPATI TABALONG,



DR. Drs. H. ANANG SYAKHFIANI, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	iii
Ikhtisar Eksekutif	v
Daftar Tabel	xi
Daftar Grafik	xiv
Daftar Foto	xv
Bab I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum	3
1.3. Kondisi Demografis.....	7
1.4. Organisasi Perangkat Daerah	8
1.5. Kondisi Aparatur Sipil Negara	10
1.6. Isu Strategis	11
1.7. Capaian Kinerja Makro atas Pelaksanaan Program dan kegiatan tahun 2023.....	14
Bab II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis 2019- 2024	26
2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.....	46
2.3. Program untuk Pencapaian Sasaran	50
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023	53
3.2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023.....	55
3.3. Akuntabilitas Anggaran Tahun 2023.....	154
3.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dengan hasil kinerja yang telah dicapai.....	161
BAB IV PENUTUP	162

LAMPIRAN

Daftar Penghargaan Tahun 2023

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tabalong Tahun 2023 merupakan laporan tahun ke-4 dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2024, berisi pertanggungjawaban Kinerja tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tabalong ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu juga mengacu pada Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Kabupaten Tabalong.

Laporan kinerja ini juga dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana setiap tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran dapat memberikan dukungan dalam rangka mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tabalong pada tahun 2023. Capaian kinerja dari tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran dapat diberikan ringkasan hasil sebagai berikut :

Tujuan 1: **“Mewujudkan masyarakat dan pemerintahan daerah yang beriman, berkepribadian dan produktif”**

Dengan jumlah 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator utama yaitu :

- a. Angka Kriminalitas, dengan capaian realisasi kinerja 100 Persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.

Tujuan 2: **“Memajukan perekonomian daerah yang didukung oleh pengembangan sumber daya alam dan infrastruktur yang berkelanjutan”**

Dengan jumlah 8 (delapan) sasaran dan 12 (dua belas) indikator kinerja utama yaitu:

- a. Pertumbuhan Ekonomi dengan capaian realisasi kinerja 163,3 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.
- b. Kontribusi pertanian terhadap PDRB, dengan capaian realisasi kinerja 69,58 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sedang**.
- c. Persentase desa yang bisa di akses dengan mudah, dengan capaian realisasi kinerja 100 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.
- d. Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap, dengan capaian realisasi kinerja 101,62 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.

- e. Indeks Ketahanan Pangan, dengan capaian realisasi kinerja 94,95 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.
- f. Persentase Penduduk berakses air minum, dengan capaian realisasi kinerja 112,19 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.
- g. Indeks desa membangun, dengan capaian realisasi kinerja 113,04 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.
- h. Indeks kualitas lingkungan hidup, dengan capaian realisasi kinerja 102,84 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.
- i. Persentase UKM Aktif, dengan capaian realisasi kinerja 100 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.
- j. Persentase Koperasi Aktif, dengan capaian realisasi kinerja 71,95 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sedang**.
- k. Kontribusi perdagangan terhadap PDRB, dengan capaian realisasi kinerja 54,06 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Rendah**.
- l. Indeks Gini, dengan capaian realisasi kinerja 91,61 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.

Tujuan 3 : “ **Meningkatkan kualitas hidup masyarakat** “

Dengan jumlah 5 (lima) sasaran dan 9 (sembilan) indikator kinerja utama yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Manusia, dengan capaian realisasi kinerja 100,14 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.
- b. Angka Harapan Hidup, dengan capaian realisasi kinerja 100,96 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.
- c. Rata-rata Lama Sekolah, dengan capaian realisasi kinerja 94,22 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.
- d. Harapan Lama Sekolah, dengan capaian realisasi kinerja 91,49 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan capaian realisasi kinerja 90 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.
- f. Persentase PPKS yang dilayani, dengan capaian realisasi kinerja 96,3 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Tinggi**.

- g. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dengan capaian realisasi kinerja 100,47 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.
- h. Indeks Pembangunan Gender (IPG), dengan capaian realisasi kinerja 100,17 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.
- i. Persentase Penduduk miskin, dengan capaian realisasi kinerja 97,05 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.

Tujuan 4: **“Mewujudkan pemerintahan daerah yang profesional, transparan dan akuntabel “**

Dengan jumlah 1 (satu) sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja utama yaitu:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi, dengan capaian realisasi kinerja 96,91 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.
- b. Nilai Sakip, dengan capaian realisasi kinerja B, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sedang**..
- c. Opini BPK, dengan capaian realisasi kinerja WBK persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Masih proses audit**.
- d. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik, dengan capaian realisasi kinerja 99,37 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.

- e. Tingkat Kemandirian Daerah, dengan capaian realisasi kinerja 67,12 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sedang**.

Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran strategis terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana penjelasan di atas, maka hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 15 (lima belas) sasaran strategis dengan 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja utama, diketahui bahwa terdapat 21 (dua puluh satu) indikator kinerja yang berkriteria pengukuran nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**, 4 (empat) indikator kinerja yang berkriteria pengukuran nilai perangkat kinerja **sedang**, dan 1 (satu) indikator kinerja yang berkriteria pengukuran nilai perangkat kinerja **Sangat Rendah** dan 1 indikator belum riliss, dengan demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja utama yang capaiannya belum seperti yang diharapkan sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.

DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel 1.1.	Luas Wilayah per Kecamatan	4
Tabel 1.2.	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Tabalong.....	7
Tabel 1.3.	Jumlah Pegawai Pemerintah Kabupaten Tabalong menurut Tingkat Pendidikan Formal	10
Tabel 1.4.	Jumlah Pegawai Pemerintah Kabupaten Tabalong menurut Tingkat Kepangkatan/Golongan	15
Tabel 1.5.	Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2023.....	12
Tabel 1.6.	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2023.	16
Tabel 1.7.	Indikator Kemiskinan Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2023.....	17
Tabel 1.8.	Angka Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2023	18
Tabel 1.9.	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Tabalong Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2023 (persen).....	21
Tabel 1.10.	Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2023.....	24
Tabel 1.11.	Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2023.....	25
Tabel 1.12.	Persentase Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2023 (Menurut Bank Dunia).....	25
Tabel 2.2.1	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2023.....	47
Tabel 2.3.1	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Tahun 2023.....	50
Tabel 3.1.	Skala Nilai Perangkat Kinerja	53
Tabel 3.1.1	Capaian Kinerja Tahun 2023	54
Tabel 3.1.2	Pencapaian Indikator Sasaran	55

Tabel 3.2.1.	Meningkatnya Pemahaman Dan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan di Masyarakat.....	56
Tabel 3.2.2.	Analisis Kebutuhan Sumber Daya.....	59
Tabel 3.2.3.	Berkembangnya Agribisnis Terpadu yang Berkelanjutan.....	61
Tabel 3.2.4.	Analisis Kebutuhan Sumber Daya.....	68
Tabel 3.2.5	Meningkatnya Akses Mobilitas dan Kualitas Jalan yang Menghubungkan seluruh Wilayah Kabupaten.....	74
Tabel 3.2.6	Analisis Kebutuhan Sumber Daya.....	78
Tabel 3.2.7.	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah.....	80
Tabel 3.2.8	Analisis Kebutuhan Sumber Daya.....	83
Tabel 3.2.9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Air Minum.....	85
Tabel 3.2.10	Analisis Kebutuhan Sumber Daya.....	88
Tabel 3.2.11	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa.....	89
Tabel 3.2.12	Analisis Kebutuhan Sumber Daya.....	91
Tabel 3.2.13	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan.....	92
Tabel 3.2.14	Analisis Kebutuhan Sumber Daya.....	95
Tabel 3.2.15	Meningkatnya Pertumbuhan di Sektor Industri Kecil, Menengah dan Koperasi.....	98
Tabel 3.2.16	Analisis Kebutuhan Sumber Daya.....	100
Tabel 3.2.17	Analisis Kebutuhan Sumber Daya.....	103
Tabel 3.2.18	Terkendalinya Ketimpangan Pendapatan.....	104
Tabel 3.2.19	Analisis Kebutuhan Sumber Daya.....	108
Tabel 3.2.20	Meningkatnya Akses Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Pendidikan Dan Sosial Budaya Serta Penerapan Iptek Secara Optimal.....	111
Tabel 3.2.21.	Jumlah Pegawai, Kualitas Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural di Dinas Kesehatan, Gudang Farmasi dan Puskesmas Kabupaten Tabalong Tahun 2022.....	117
Tabel 3.2.22	Terkendalinya Ketimpangan Pendapatan.....	117
Tabel 3.2.23.	Hasil Akreditasi Puskesmas Kabupaten Tabalong Tahun 2023.....	118
Tabel 3.2.24	Analisis Kebutuhan Sumber Daya.....	120
Tabel 3.2.25	Meningkatnya Kesempatan Kerja Terutama Bagi Penduduk Lokal.....	123

Tabel 3.2.26	Analisis Kebutuhan Sumber Daya.....	126
Tabel 3.2.27	Meningkatnya Kualitas Dan Jangkauan Pelayanan Sosial	128
Tabel 3.2.28	Analisis Kebutuhan Sumber Daya.....	129
Tabel 3.2.29	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	132
Tabel 3.2.30	Analisis Kebutuhan Sumber Daya.....	137
Tabel 3.2.31	Menurunnya Tingkat Kemiskinan.....	139
Tabel 3.2.32	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2023.....	141
Tabel 3.2.33	Kemiskinan Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2023.....	141
Tabel 3.2.34	Analisis Kebutuhan Sumber Daya.....	141
Tabel 3.2.35	Meningkatnya Pengelolaan Dan Kinerja Pemerintah Daerah Serta Kualitas Pelayanan Publik.....	146
Tabel 3.2.36	Analisis Kebutuhan Sumber Daya.....	153
Tabel 3.3. 1	Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2023.....	154
Tabel 3.3. 2	Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2023.....	156
Tabel 3.3. 3	Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan Tahun Anggaran 2023.....	160

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.	Luas Wilayah Kabupaten menurut Kecamatan (km ²)	6
-------------	---	---

DAFTAR FOTO

Foto 1.1	Peta Wilayah Kabupaten Tabalong.....	5
Foto 3.2.1	Sinergitas Lintas Fungsi Oprasi Pekat.....	57
Foto 3.2.2	Bantuan Alat Pertanian.....	62
Foto 3.2.3	Jalan Desa dan Jalan Kabupaten.....	74
Foto 3.2.4	Kampung Hortikultura di Desa Catur Karya.....	81
Foto 3.2.5	Pemasangan Air Bersih.....	86
Foto 3.2.6	Kegiatan Belajar paket.....	112
Foto 3.2.7	Kegiatan Bimbingan Wira Usaha.....	124
Foto 3.2.8	Kegiatan Bimbingan Teknis PUG Melalui PPRG Bagi SKPD	133
Foto 3.2.9	Kegiatan Pemberian Paket Usaha dan Bantuan Bahan Pokok.....	139

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di bangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja untuk penyediaan informasi kinerja. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah yang baik, maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada setiap akhir tahun.

Sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hadirnya dua regulasi ini akan mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reuiu / evaluasi kinerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya **Good Governance** atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

1.2. Gambaran Umum Kabupaten Tabalong

Kabupaten Tabalong terbentuk secara sah dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).

1.2.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Tabalong dengan Ibukotanya Tanjung terletak paling utara dari Provinsi Kalimantan Selatan, mempunyai luas wilayah 3.646 Km² atau 364.651,65 hektar atau 10,61% dari luas Provinsi Kalimantan Selatan. Secara astronomis, Tabalong terletak antara 1,18° - 2,25° Lintang Selatan dan antara 115,9° - 115,47° Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Tabalong memiliki batas-batas:

Sebelah utara : Provinsi Kalimantan Timur

Sebelah timur : Provinsi Kalimantan Timur

Sebelah selatan : Kabupaten Hulu Sungai Utara

Sebelah barat : Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan letak geografisnya, Tabalong berada di antara Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Posisi ini menjadikan Kabupaten Tabalong sebagai jalur segitiga emas di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan letak yang

strategis ini bisa menjadi muara mengalirnya pengembangan aspek ekonomi dan sosial budaya ketiga provinsi tersebut.

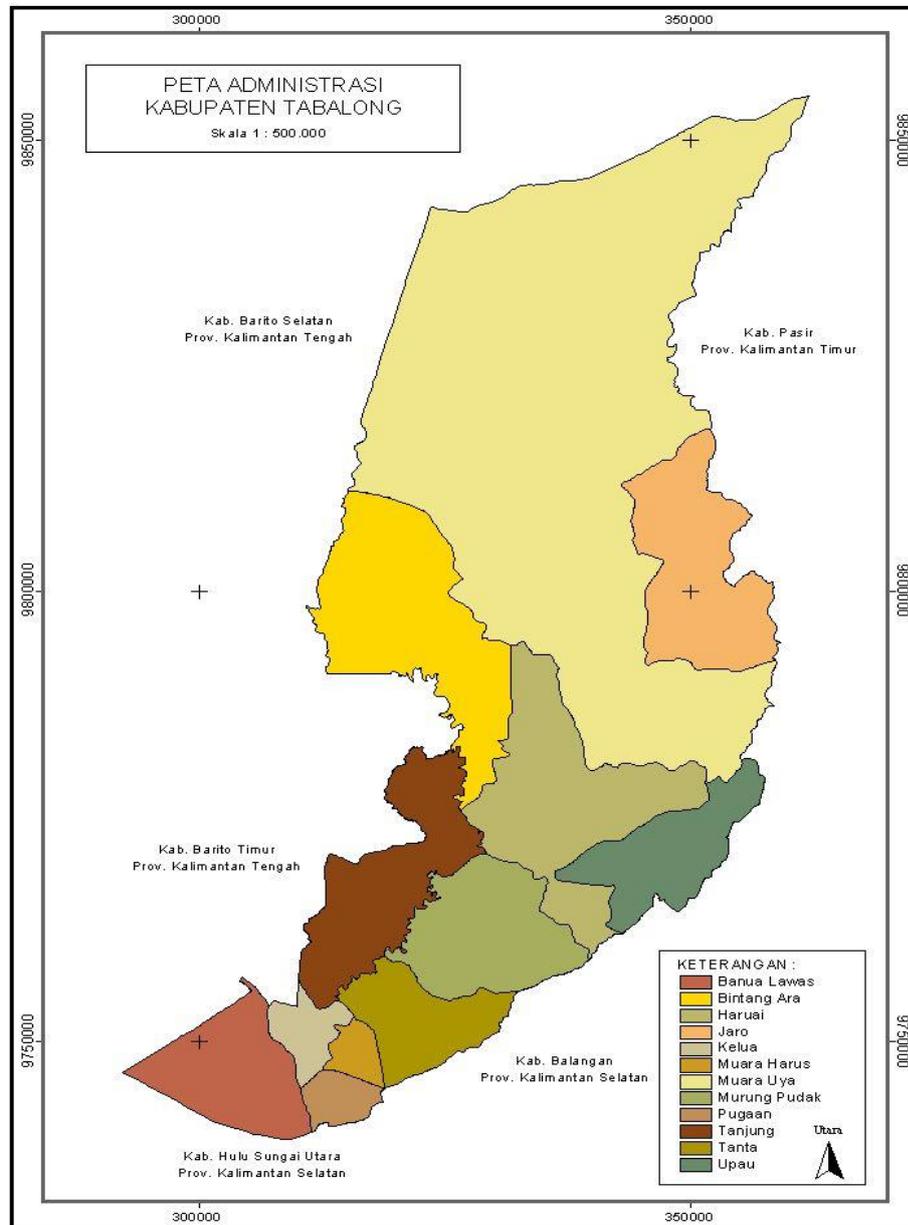
Tabalong terdiri dari 12 Kecamatan yaitu: Banua Lawas, Pugaan, Kelua, Muara Harus, Tanta, Tanjung, Murung Pudak, Haruai, Bintang Ara, Upau, Muara Uya, dan Jaro.

Tabel 1.1
Luas Wilayah per Kecamatan

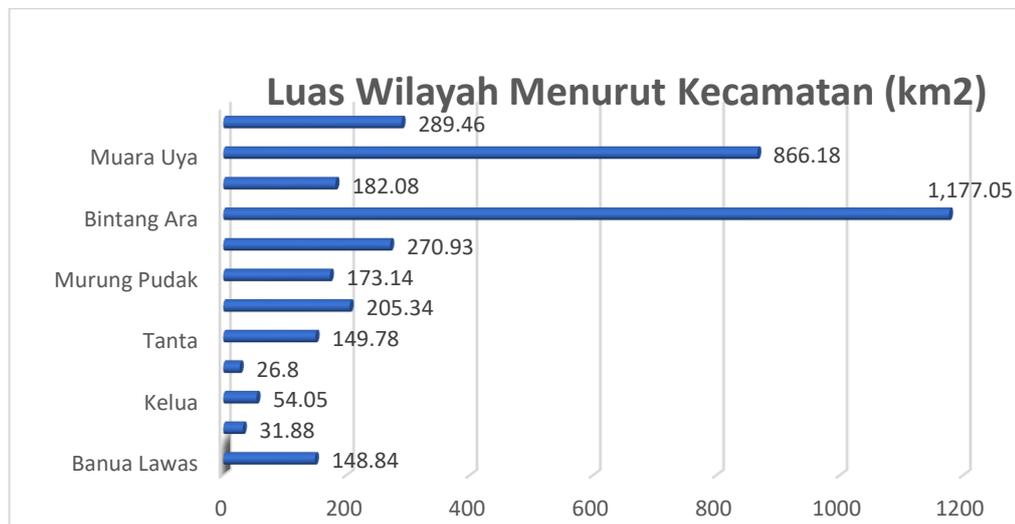
No	Kecamatan	Luas (ha)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1.	Banua Lawas	16.596,33	15	-
2.	Pugaan	3.571,84	7	-
3.	Kelua	4.924,06	11	1
4.	Muara Harus	2.895,28	7	-
5.	Tanta	13.085,18	14	-
6.	Tanjung	22.606,03	11	4
7.	Murung Pudak	20.481,24	5	5
8.	Haruai	31.947,37	13	-
9.	Upau	15.519,17	6	-
10.	Muara Uya	173.791,87	14	-
11.	Jaro	25.023,58	9	-
12.	Bintang Ara	34.209,69	9	-
Luas Keseluruhan		364.651,65	121	10

Sumber : Kabupaten Tabalong Dalam Angka 2023

Foto 1.1
PETA WILAYAH KABUPATEN TABALONG



Grafik 1.1.

Luas Wilayah Kabupaten Tabalong menurut Kecamatan (km²)

Dalam proses pembangunan Kabupaten Tabalong, dikelompokkan dalam 3 wilayah, yaitu:

- **Wilayah Utara**

Wilayah ini meliputi Kecamatan Haruai, Bintang Ara, Upau, Muara Uya, dan Jaro dengan pusat pengembangan di Kecamatan Muara Uya. Potensi wilayah ini adalah perkebunan, pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan, daerah transmigrasi dan pariwisata.

- **Wilayah Tengah**

Wilayah ini meliputi Kecamatan Tanta, Tanjung, Murung Pudak, dengan pusat pengembangan di Kecamatan Tanjung, potensinya

adalah perkebunan, pusat pemerintahan, perdagangan, industri, pendidikan & kebudayaan, pariwisata.

o **Wilayah Selatan**

Wilayah ini meliputi kecamatan Banua Lawas, Pugaan, Kelua, Muara Harus, dengan pusat pengembangannya di Kecamatan Kelua. Potensi adalah: industri kerajinan rumahtangga purun dan pandai besi, pertanian tanaman pangan, peternakan unggas dan perikanan.

1.3. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Tabalong pada tahun 2023 sebesar **262.631** jiwa dengan penyebaran penduduk Tabalong masih terkonsentrasi di Kecamatan Murung Pudak yakni sebesar 57.721 jiwa. sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 1.2
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Tabalong
Tahun 2018 s/d 2023

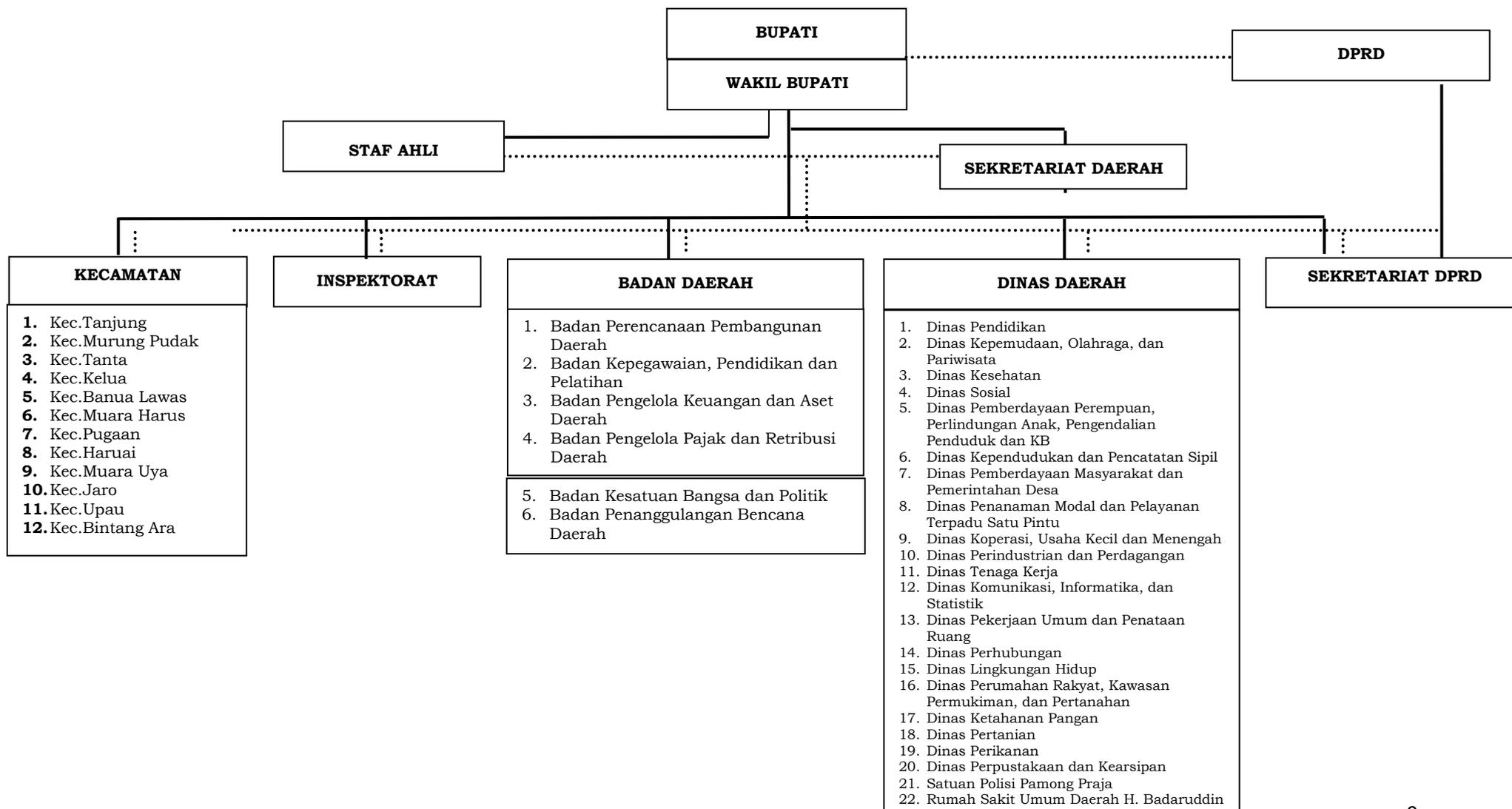
No.	Kecamatan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Banua Lawas	20.217	19.582	20.201	20.319	20.763	21.112
2	Kelua	25.876	24.554	24.911	24.816	25.324	25.702
3	Tanta	19.751	20.591	22.168	21.947	22.875	23.614
4	Tanjung	37.291	35.678	35.889	36.472	37,059	37.367
5	Haruai	23.073	23.430	23.688	23.829	24.366	24.486

6	Murung Puduk	51.968	51.473	56.790	54.471	56.235	57.721
7	Muara Uya	24.884	23.128	23.839	23.735	24.319	24.668
8	Muara Harus	6.679	6.779	6.795	7.007	7.138	7.188
9	Pugaan	7.328	7.222	7.443	7.510	7.728	7.811
10	Upau	8.040	7.408	7.366	7.400	7.664	7.752
11	Jaro	16.537	14.774	15.059	15.228	15.676	15.731
12	Bintang Ara	9.165	9.090	9.146	9.170	9.378	9.479
	Kab. Tabalong	250.809	243.763	253.305	251.904	258.525	262.631

1.4. Organisasi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdiri dari :

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG



1.5. Kondisi Aparatur Sipil Negara

Jumlah ASN / PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong sampai dengan Desember 2022 berjumlah 4.088 orang, dapat dirincikan berdasarkan tabel / grafik sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Pemerintah Kabupaten Tabalong
Menurut Tingkat Pendidikan Formal
Tahun 2023

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD	35
2.	SLTP	44
3.	SLTA	314
4.	D I	5
5.	D II	89
6.	D III	521
7.	D IV	97
8.	S1	2.414
9.	S 2	263
10.	S3	5
11.	Profesi	38
12.	Spesialis	18
Jumlah		3.843

Sumber: BKPP Kab. Tabalong, tahun 2023

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Pemerintah Kabupaten Tabalong
Menurut Tingkat Kepangkatan/ Golongan
Tahun 2023

No	Kepangkatan dan Golongan	Jumlah
1	Golongan I :	34
	- I/a	0
	- I/b	
	- I/c	

	- I/d	
2	Golongan II :	390
	- II/a	
	- II/b	
	- II/c	
	- II/d	
3	Golongan III :	2.484
	- III/a	
	- III/b	
	- III/c	
	- III/d	
4	Golongan IV :	935
	- IV/a	
	- IV/b	
	- IV/c	
	- IV/d	
	- IV/e	
JUMLAH		3.843

Sumber: BKPP Kab. Tabalong, tahun 2023

1.6. Isu Strategis

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Kabupaten Tabalong dari berbagai aspek pembangunan, dapat dirumuskan beberapa isu strategis Kabupaten Tabalong. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) Kabupaten Tabalong 2019 - 2024 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal - hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam menentukan isu strategis, maka dapat diidentifikasi isu strategis Kabupaten Tabalong 2019-2024, sebagai berikut:

1. Peningkatan Perekonomian Daerah

- a. Pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan UKM agar memperkuat dasar kehidupan perekonomian masyarakat, khususnya dalam rangka pemulihan ekonomi daerah.
- b. Pemberian kemudahan berusaha dan kondisi yang kondusif untuk mendorong tumbuhnya investasi.
- c. Peningkatan pengelolaan sektor pertanian untuk menunjang perekonomian daerah dan ketersediaan pangan serta sebagai penyangga ibukota Negara baru.
- d. Peningkatan pembangunan dan keberdayaan ekonomi masyarakat desa.
- e. Meningkatkan kemandirian pangan;
- f. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian;
- g. Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan jasa;
- h. Memperkuat pondasi perekonomian yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan.
- i. Penurunan angka kemiskinan.
- j. Pengembangan sentra industri.

- k. Pengembangan ekonomi dengan menggeser dominasi sektor pertambangan kepada sektor non-tambang terutama sektor yang berkontribusi besar dan pertumbuhan yang baik.

2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

- a. Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
- b. Peningkatan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- c. Penurunan stunting.
- d. Universal Health Coverage (UHC) /Jaminan Kesehatan Nasional.
- e. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan pendidikan.
- f. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan.

3. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Wilayah

- a. Penyediaan akses air minum 100%, kawasan permukiman kumuh perkotaan 0 Ha dan akses sanitasi layak 100%.
- b. Penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak.
- c. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur yang berkualitas.
- d. Pemanfaatan dan pengendalian Rencana tata ruang kawasan strategis.
- e. Pembangunan kota tanpa kumuh.

4. Penyelenggaraan Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan

- a. Pembangunan Pengendali Erosi dan Proteksi Sungai di Tabalong.
- b. Menyelenggarakan dan mendorong pengelolaan SDA berwawasan lingkungan.
- c. Pembangunan kampung iklim.

5. Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah

- a. Peningkatan tata kelola dan kinerja pemerintahan daerah serta kualitas dan cakupan pelayanan publik.
- b. Pengembangan dan penerapan teknologi dalam pembangunan.
- c. Perencanaan dan penganggaran responsif gender.
- d. Kebijakan pengaturan penyelenggaraan event seni dan budaya se Provinsi Kalimantan Selatan.
- e. Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik akan tetap dibiayai melalui APBD sampai dengan peraturan perundang-undangan tentang urusan pemerintahan umum diundangkan.

1.7. Capaian Kinerja Makro Atas Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2023

1. Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu ukuran kualitas yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan manusia yang telah berhasil dicapai adalah dengan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah, sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut. Perkembangan angka IPM memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia pada suatu daerah. IPM disusun dari tiga komponen yaitu tingkat kesehatan yang diukur dengan angka harapan hidup pada saat lahir (lama hidup), tingkat pendidikan yang diukur dengan kombinasi antara angka harapan lama sekolah (EYS) dan rata-rata lama sekolah (MYS) dan tingkat kehidupan yang layak, diukur dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP).

Tabel 1.5
Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tabalong
Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,33	70,44	70,57	74,45	74,63
2.	Indeks Pendidikan					
	a. EYS (Rata-rata harapan lama sekolah	12,59	12,72	12,89	12,90	12,91
	b. MYS (Rata-rata lama sekolah	8,78	9,10	9,11	9,12	9,14
3.	Pengeluaran riil per kapita (PPP) (x Rp.1000,-)	11.476	11.283	11.470	11.914	12.507
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,78	72,19	72,60	74,82	75,43

Sumber : BPS Kab. Tabalong, Tahun 2024

Perhitungan IPM pada Tahun 2023, BPS menggunakan metode longform sesuai penduduk tahun 2020, sehingga terjadi perubahan nilai Angka Harapan Hidup (AHH) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2022. Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Tabalong dari tahun 2019 sampai 2023 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 menjadi 70,33 tahun, pada tahun 2020 menjadi 70,44 tahun, pada tahun 2021 menjadi 70,57 tahun, pada tahun 2022 menjadi 74,45 dan pada tahun 2023 menjadi sebesar 74,63. AHH ini dapat menggambarkan kualitas hidup masyarakat disuatu daerah yang dikaitkan dengan status kesehatan, pendidikan dan tingkat ekonomi.

Salah satu keberhasilan program pendidikan di Kabupaten Tabalong ditunjukkan dengan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Rata-rata Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Tabalong juga selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 12,59 tahun, pada tahun 2020 menjadi 12,72 tahun, pada tahun 2021 menjadi 12,89 dan pada tahun 2022 menjadi sebesar 12,90 tahun serta menjadi sebesar 12,91 tahun pada tahun 2023. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Tabalong juga selalu mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2019 sebesar 8,78 tahun, menjadi sebesar 9,10 tahun pada tahun 2020, sebesar 9,11 tahun pada tahun 2021 dan sebesar 9,12 pada tahun 2022 serta sebesar 9,14 tahun pada tahun 2023.

Pengeluaran riil per kapita per tahun merupakan pengeluaran riil per kapita yang telah disesuaikan untuk menggambarkan daya beli masyarakat. Untuk Kabupaten Tabalong, pengeluaran riil per kapita mengalami peningkatan dari Rp11.476.000,00 pada tahun 2019, mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi

Rp11.283.000,00 sebagai akibat dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp11.470.000,00 dan pada tahun 2022 meningkat lagi menjadi Rp11.914.000,00, serta meningkat lagi menjadi Rp12.507.000,00 pada tahun 2023.

Berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM), pencapaian IPM Kabupaten Tabalong memperlihatkan pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2023 IPM Kabupaten Tabalong sebesar 75,43, terjadi peningkatan sebesar 0,61 point dibandingkan dengan tahun 2022 yang besarnya 74,82. Pada tahun 2021 sebesar 72,60, tahun 2020 sebesar 72,19 dan pada tahun 2019 sebesar 71,78. Rata-rata pertumbuhan IPM per tahun sejak tahun 2019-2023 adalah sebesar 0,9125 point.

Menurut konsep pembangunan manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), IPM Kabupaten Tabalong masuk dalam kategori kinerja pembangunan manusia tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Sejak tahun 2016 capaian angka IPM Kabupaten Tabalong di atas 70. Kondisi ini merupakan kebanggaan tersendiri untuk Kabupaten Tabalong karena pada tahun-tahun sebelumnya hanya berada pada kategori sedang, yaitu dikasaran angka IPM antara 60-70. Kabupaten Tabalong telah berhasil merubah statusnya dari “sedang” menjadi “tinggi”.

Apabila dilihat dari peringkat IPM seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, maka sejak tahun 2016 sampai tahun 2022 IPM Kabupaten Tabalong berada di urutan ke-3.

Tabel 1.6
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2023

Kabupaten/ Kota	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	IPM	Rank	IPM	IPM	IPM	Rank	IPM	Rank	IPM	Rank
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tanah Laut	68,00	6	68,49	6	69,87	7	72,33	8	72,98	8
Kotabaru	67,79	8	68,32	8	69,13	9	71,57	11	72,01	11
Banjar	67,77	10	68,32	10	69,89	6	73,25	5	74,01	4
Barito Kuala	64,93	12	65,91	12	66,64	12	69,87	13	70,67	13
Tapin	70,13	5	70,11	5	70,31	5	72,61	6	73,52	6
Hulu Sungai Selatan	68,8	9	68,85	9	69,21	8	72,47	7	73,21	7
Hulu Sungai Tengah	68,8	9	68,84	10	69,05	11	72,32	9	72,76	10
Hulu Sungai Utara	65,49	13	65,59	13	66,12	13	70,33	12	71,12	12
Tabalong	71,78	3	72,19	3	72,60	3	74,82	3	75,43	3
Tanah Bumbu	70,5	4	70,71	4	71,00	4	73,34	4	73,86	5

Balangan	68,39	11	68,82	11	69.11	10	72,20	10	72,97	9
Banjarmasin	77,16	2	77,10	2	77.57	2	79,,46	2	79,98	2
Banjarbaru	79,22	1	79,10	1	79.26	1	80,82	1	81,25	1
Kalimantan Selatan	70,72	22	70,91	22	71.28	22	71,84	22		

Sumber : BPS Kab. Tabalong, Tahun 2024

2. Angka Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah baik di pusat maupun didaerah. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrument tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

Tabel 1.7
Indikator Kemiskinan Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2023

Indikator (Keterangan)	2019	2020	2021	2022	2023*)
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	463.980	531.180	542,800	573.018	615.912
Penduduk Miskin	15,222	14,695	16,128	15.243	15.150
Persentase Penduduk Miskin (%)	6.01	5.72	6.27	5,87	5,77

Sumber : BPS Kab. Tabalong Tahun 2024

Catatan : *) Angka sangat-sangat sementara

Apabila dilihat dari perkembangannya selama beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk miskin selama periode 2019-2023 berfluktuasi dengan garis kemiskinan di Kabupaten Tabalong mengalami kenaikan dari sebesar Rp463.980/kapita/bulan pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp531.180/kapita/bulan pada tahun 2020, meningkat lagi menjadi Rp542.800/kapita/bulan pada tahun 2021, meningkat menjadi Rp573.018 pada tahun 2022 dan menjadi sebesar Rp615.912/kapita/bulan pada tahun 2023.

Namun angka kemiskinan berfluktuatif, dimana pada tahun 2019 sebesar 6,01% atau sekitar 15.222 jiwa, mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 5,72% atau sekitar 14.695 jiwa, pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 6,27% atau 16.128 jiwa. Pada tahun 2022 turun lagi menjadi 5,87% atau 15.243 jiwa dan turun lagi menjadi sebesar 5,77% atau 15.150 jiwa pada tahun 2023.

3. Angka Pengangguran

Sudah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Tabalong bahwa salah satu target dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Tabalong adalah dengan upaya menurunkan angka pengangguran.

Dalam pandangan masyarakat awam, pengangguran adalah orang yang tidak bekerja, sehingga pengangguran merupakan momok yang menakutkan bagi setiap orang. Namun demikian yang dimaksud pengangguran dalam konsep ketenagakerjaan adalah penduduk yang tidak bekerja dengan kegiatan seperti :

- a. Sedang mencari pekerjaan, atau
- b. Sedang mempersiapkan usaha, atau
- c. Penduduk yang tidak mencari pekerjaan, karena alasan merasa atau tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa), atau
- d. Sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran suatu daerah dapat diketahui dari angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan perbandingan antara penduduk yang mencari kerja dengan angkatan kerja pada suatu daerah. Pengangguran terbuka adalah masalah yang sering timbul dalam ketenagakerjaan, yang merupakan akibat dari meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan peningkatan lapangan kerja. Lapangan kerja semakin sempit sehingga banyak angkatan kerja yang tidak terserap dalam lapangan kerja. Angka pengangguran di Kabupaten Tabalong periode 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.8
Angka Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023*)

1.	Angka Pengangguran (Jiwa)	4.287	4.145	4.666	6.219	5.052
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,18	3,07	3,43	4,46	3,60

Sumber : BPS Kab. Tabalong Tahun 2024

Catatan : *) Angka sangat-sangat sementara.

Dari data di atas terlihat bahwa pada tahun 2023 TPT di Kabupaten Tabalong sebesar 3,60%, angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022 yang besarnya 4,46%. Besarnya angka pengangguran selama periode tahun 2019 – 2023 berfluktuasi, dimana pada tahun 2019 sebesar 4.287 jiwa turun menjadi 4.145 jiwa pada tahun 2020, namun pada tahun 2021 dan 2022 meningkat menjadi 4.666 jiwa dan 6.219 jiwa. Pada tahun 2023 terjadi penurunan angka pengangguran menjadi 5.052 jiwa.

Demikian juga dengan persentase tingkat pengangguran terbuka terjadi fluktuasi, yaitu pada tahun 2019 sebesar 3,18 persen turun menjadi 3,07 persen, namun pada tahun 2021 dan 2022 meningkat menjadi 3,43 persen dan 4,46 persen dan pada tahun 2023 ini kembali turun menjadi 3,60 persen.

Menurut penjelasan BPS Kabupaten Tabalong, diketahui bahwa jumlah penduduk bukan angkatan kerja menurun dari 54.244 orang pada tahun 2021 menjadi 53.422 orang pada tahun 2022. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi penduduk yang semula bukan angkatan kerja bergeser menjadi angkatan kerja yang merupakan salah satu penyebab meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka, karena peningkatan angkatan kerja tidak diiringi oleh peningkatan ataupun perluasan lapangan kerja. Lapangan kerja yang terbatas membuat sebagian angkatan kerja tidak terserap.

Dari hasil data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus, terjadi penurunan persentase penduduk yang bekerja pada sektor jasa-jasa dari 53.352 orang (40,61%) pada tahun 2021 menjadi 46.652 orang (35,51%). Penduduk yang semula bekerja pada sektor perdagangan kemudian berhenti dan mencari pekerjaan lain diduga menjadi salah satu penyumbang pengangguran.

Diperoleh fakta di lapangan bahwa jumlah pengangguran tertinggi berlatar belakang Pendidikan menengah ke atas (pengangguran terdidik). Persentase pengangguran terdidik baik pada tahun 2021 dan 2022 mencapai sekitar 90%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat Pendidikan yang tinggi tidak selalu menjamin seseorang mendapatkan pekerjaan. Hal ini disebabkan karena lulusan rendah siap menerima pekerjaan pada bidang atau lapangan usaha apapun,

sedangkan pengangguran terdidik cenderung lebih selektif dan bersedia untuk mencari pekerjaan lebih lama sampai mendapatkan pekerjaan yang sesuai.

Pada tahun 2023 angka pengangguran menurun dibandingkan tahun 2022, yang sebesar 6.219 jiwa pada tahun 2022 menjadi 5.052 pada 2023. Demikian juga dengan tingkat pengangguran terbuka turun sebesar 0,86 persen yang pada tahun 2022 sebesar 4,46 persen menjadi 3,60 persen pada tahun 2023.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai sektor ekonomi. Angka ini dapat diartikan sebagai kemampuan daerah/region tersebut dalam jangka panjang untuk menyuplai berbagai unit/jasa yang terus meningkat kepada penduduknya atau dengan kata lain proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Tingkat pertumbuhan ini ditentukan oleh penambahan riil berbagai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Tabalong, kinerja perekonomian Kabupaten Tabalong selama tahun 2023 mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2022. Hal ini ditunjukkan dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang sebesar 4,90 persen (yoy), melambat dibandingkan tahun 2022 yang besarnya 5,29 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan terendah dicapai lapangan usaha industri pengolahan, yaitu sebesar 0,73 persen dan tertinggi terjadi pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, yaitu sebesar 9,83 persen.

Sektor yang memberikan sumber terbesar pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabalong adalah sektor pertambangan, disusul Pertanian dan Perdagangan. Nilai PDRB Kabupaten Tabalong atas dasar harga berlaku tahun 2023 mencapai 31.015,26 miliar rupiah naik 1.842,97 miliar rupiah dibanding tahun 2022 yang tercatat 29.172,29 miliar rupiah. Sedangkan berdasarkan harga konstan mencapai 16.516,95 miliar rupiah atau naik 771,23 miliar rupiah dibanding tahun 2022 yang tercatat 15.745,72 triliun rupiah.

Ritme ekonomi global membawa dampak yang menyebar ke berbagai negara/wilayah. Hal ini disebabkan semakin terintegrasinya perekonomian antar negara sebagai konsekuensi dari semakin terbukanya perekonomian negara di dunia. Perekonomian Kabupaten Tabalong sebagai salah satu bagian integral

perekonomian nasional juga tidak lepas dari dampak pergerakan ekonomi global. Kategori lapangan usaha pertambangan (batubara dan minyak bumi) menjadi lapangan usaha dominan dalam perekonomian Kabupaten Tabalong. Oleh karena itu, jalur perdagangan (ekspor) menjadi rentan terhadap dampak perekonomian global, yang mempengaruhi pergerakan ekonomi Kabupaten Tabalong.

Tabel 1.9
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Tabalong
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2019 – 2023 (persen)

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022*	2023**
1	2	5	6	7	8	9
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,91	-1,99	2,71	2,88	2,51
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,01	-4,13	1,38	5,57	4,76
3.	Industri Pengolahan	3,37	-3,50	5,30	5,00	0,73
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	8,34	4,71	4,74	7,85	8,29
5.	Pengadaan Air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	7,31	7,52	4,46	3,34	4,63
6.	Konstruksi	7,59	-1,83	5,34	4,49	7,93
7.	Perdagangan Besar, Eceran dan Reparasi	9,48	-2,30	8,80	8,13	7,61
8.	Transportasi dan Pergudangan	9,13	-4,47	4,45	5,74	7,74
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,02	-0,91	7,59	7,42	9,83
10.	Informasi dan Komunikasi	9,57	8,02	8,41	8,66	6,96
11.	Jasa Keuangan dan asuransi	5,51	2,52	2,46	1,38	5,36
12.	Real Estate	8,82	3,16	5,24	6,26	6,12
13.	Jasa Perusahaan	6,85	-1,35	7,85	5,06	8,15
14.	Adm Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	5,68	-0,77	0,47	-0,28	4,83
15.	Jasa Pendidikan	7,95	-0,78	3,04	4,27	3,50
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,02	7,22	9,71	7,30	5,53
17.	Jasa Lainnya	10,81	-2,53	5,86	6,88	7,45
	PDRB	3,50	-2,50	3,27	5,30	4,90

Sumber : BPS Kab. Tabalong Tahun 2023

Catatan :

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Pada tahun 2020 pertumbuhan positif hanya terjadi pada 6 (enam) kategori ekonomi, yaitu pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, real estate dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 8,02%, sektor pengadaan air sebesar 7,52% dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 7,22%. Namun pada tahun 2021, semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha jasa Kesehatan dan kegiatan sosial, yaitu sebesar 9,71%.

Sedangkan pada tahun 2023 ada 8 (delapan) lapangan usaha mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022, yaitu sektor Pengadaan listrik dan gas yang pada tahun 2022 sebesar 7,85 menjadi 8,29 pada tahun 2023, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yang pada tahun 2022 sebesar 3,34 menjadi 4,63 pada tahun 2023, sektor konstruksi yang semula sebesar 4,49 menjadi 7,93 pada tahun 2023, sektor transportasi dan pergudangan yang semula 5,74 menjadi 7,74 pada tahun 2023, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang semula 7,42 menjadi 9,83 pada tahun 2023, sektor jasa keuangan dan asuransi yang semula 1,38 menjadi 5,36 pada tahun 2023, sektor jasa perusahaan yang semula 5,06 menjadi 8,15 pada tahun 2023, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang semula -0,28 menjadi 4,83 pada tahun 2023, dan sektor jasa lainnya yang semula 6,88 menjadi 7,43 pada tahun 2023. Disamping itu 8 (delapan) sektor lainnya pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang semula 2,88 menjadi 2,51 pada tahun 2023, sektor pertambangan dan penggalian yang semula 5,57 menjadi 4,76 pada tahun 2023, sektor industry yang semula 5,00 menjadi 0,73 pada tahun 2023, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang semula 8,13 menjadi 7,61 pada tahun 2023, sektor informasi dan komunikasi yang semula 8,66 menjadi 6,96 pada tahun 2023, sektor real estate yang semula 6,26 menjadi 6,12 pada tahun 2023, sektor jasa Pendidikan yang semula 4,27 menjadi 3,50 pada tahun 2023, sektor jasa Kesehatan dan kegiatan social yang semula 7,30 mejadi 5,53 pada tahun 2023,

5. Pendapatan Per Kapita

PDRB perkapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk selama satu tahun akibat dari adanya aktivitas produksi. Sedangkan pendapatan regional perkapita merupakan gambaran

pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi.

Data tersebut diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB/pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun (karena penyebarannya dianggap lebih merata). Kedua indikator tersebut biasanya digunakan untuk mengukur tingkat produktivitas dan tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah. Apabila data tersebut disajikan secara berkala akan menunjukkan adanya perubahan kualitas sumber daya manusia dan perubahan tingkat kemakmuran. Tingkat pertumbuhan PDRB perkapita juga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan kemampuan dari suatu region untuk memperluas atau mempertinggi output/keluaran pada tingkat yang lebih cepat dari pada tingkat pertumbuhan populasinya. PDRB perkapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun pada waktu tertentu.

Negara maju rata-rata memiliki PDB perkapita yang lebih besar dibandingkan dengan negara sedang berkembang. Menurut klasifikasi World Bank, negara yang berpendapatan perkapita kurang dari \$1.005 dikategorikan sebagai negara berpendapatan rendah. Sementara negara yang berpendapatan perkapita antara \$1.006 - \$3.955 termasuk negara berpendapatan menengah bawah, negara yang memiliki pendapatan perkapita antara \$3.956- \$12.235 dikategorikan sebagai Negara yang berpendapatan menengah tinggi, dan negara yang memiliki pendapatan perkapita lebih dari \$12.235 termasuk negara berpendapatan perkapita tinggi.

Perkembangan PDRB per kapita di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada Tabel III.12. Selama tahun 2019-2023, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Tabalong rata-rata semakin meningkat setiap tahunnya, dari 72.056,89 juta rupiah pada tahun 2019 turun menjadi 117.748,32 juta rupiah pada tahun 2023, atau tumbuh rata-rata 9,70 persen setiap tahunnya. PDRB (ADHB) Tahun 2023 naik sebesar 5.478,54 juta rupiah dibanding tahun 2022, yaitu dari 112.269,78 juta rupiah tahun 2022 menjadi 117.748,32 juta rupiah pada tahun 2023. Jika diukur dalam USD, PDRB perkapita Tabalong masih termasuk dalam kategori berpendapatan menengah tinggi.

Perkembangan PDRB perkapita di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.10
PDRB Perkapita Tahun 2019 – 2023

PDRB	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023*
1	2	3	4	5	6
PDRB (ADHB) (milyar rupiah)	18.175,41	17.744,39	19.255,14	29.172,84	31.015,26
PDRB (ADHK) (milyar rupiah)	14.853,25	14.482,84	14.957,25	15.746,27	16.516,95
PDRB perkapita (ADHB) (ribu rupiah)	72.056,89	70.285,25	77.829,88	112.269,78	117.748,32
PDRB perkapita (ADHK) (ribu rupiah)	58.886,08	57.366,49	58.369,89	60.597,54	62.706,01

Sumber : BPS Kab. Tabalong Tahun 2023

Catatan : *) Angka sementara

6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Pentingnya pembahasan ketimpangan bagi pemerintah tentu saja terkait dengan besarnya peran pemerintah dalam pengambilan kebijakan, yang akan berdampak besar terhadap jalannya roda pembangunan. Informasi tentang ketimpangan di antara kelompok penduduk, adalah sesuatu yang sangat berarti ketika pemerintah ingin mendesain program intervensi dalam kegiatan pembangunan. Selain itu, mengukur dan menganalisis ketimpangan secara berkala juga akan sangat membantu dalam mengetahui sifat dari perubahan ketimpangan itu sendiri. Diantaranya, kelompok-kelompok mana yang banyak mengalami perubahan dalam distribusi pendapatan sebagai akibat dari kebijakan ekonomi dan juga sektor-sektor ekonomi mana yang mengalami perubahan ketimpangan yang signifikan sebagai akibat dari kebijakan ekonomi yang diterapkan.

Distribusi pendapatan merupakan gambaran tentang pemerataan atau terjadi ketimpangan pembagian pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh seseorang dipengaruhi oleh kepemilikan faktor-faktor produksi. Besaran balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor ekonomi seperti keahlian, modal dan tanah, serta investasi akan berbeda satu sama lain. Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan secara menyeluruh. Semakin tinggi nilai angka Gini Ratio (GR) mengindikasikan bahwa ketimpangan semakin tinggi. Pengelompokan nilai koefisien Gini dibedakan menjadi 5 kelompok:

GR = 0 : Pemerataan Sempurna

0 < GR < 0,3 : Ketimpangan Rendah

0,3 ≤ GR ≤ 0,5 : Ketimpangan Sedang

0,5 < GR < 1 : Ketimpangan Tinggi

GR = 1 : Ketimpangan Sempurna

Penghitungan Gini Ratio dilakukan oleh Badan Pusat Statistik setiap tahunnya dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Variabel pendapatan sendiri, diproxy dengan menggunakan data pengeluaran dalam Susenas. Ada beberapa pertimbangan mengenai pemilihan variabel pengeluaran sebagai proxy yang tepat, beberapa literatur menyebutkan diantaranya bahwa pengeluaran lebih stabil dibandingkan pendapatan (beberapa lapangan usaha sangat rentan perubahan musim yang berimbas pada volatilitas pendapatannya), serta keterbukaan responden terhadap pengeluaran daripada pendapatannya.

Tabel 1.11
Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2023

No.	Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini Ratio)	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kabupaten Tabalong	0,296	0,305	0,288	0,337	0,284
2.	Provinsi KalSel	0,334	0,351	0,330	0,317	0,313

Sumber : BPS Kab. Tabalong Tahun 2023

Tabel 1.12
Persentase Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2023 (Menurut Bank Dunia)

No.	Persentase Pengeluaran Rata-Rata Perkapita	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	20% ke atas	39,39	43,02	39,36	58,85	20,1
2.	40% Menengah	39,57	36,93	39,43	27,20	39,8
3.	40% Terbawah	21,05	20,05	21,22	13,95	40,1

Sumber : BPS Kab. Tabalong Tahun 2023

Pada Tahun 2019-2023 ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten Tabalong masih dalam kategori ketimpangan rendah. Angka Gini Ratio tahun 2023 sebesar 0,284 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022. Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, selama kurun waktu 2019-2023 nilai indeks Gini Ratio Kabupaten Tabalong selalu dibawah Propinsi Kalimantan Selatan, namun baik kabupaten Tabalong maupun Provinsi Kalsel sama-sama berada di tingkat ketimpangan rendah. Untuk tahun 2023 gini ratio mengalami penurunan dibanding tahun 2022.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2019-2024

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 Kabupaten Tabalong merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjabarkan rencana pembangunan lima tahun secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. Selain itu dalam proses penyusunan dokumen PRPJMD menggunakan pendekatan teknokratik yang merupakan pendekatan secara ilmiah terhadap berbagai program pembangunan atas dasar kondisi dan potensi daerah. Pendekatan lainnya adalah pendekatan partisipatif, yakni dengan melibatkan unsur masyarakat dalam menyerap berbagai aspirasi yang dituangkan dalam dokumen PRPJMD ini.

2.1.1. Visi

Visi Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 adalah:

**“MENUJU KABUPATEN TABALONG YANG LEBIH AGAM AIS,
SEJAHTERA DAN MANDIRI”**

Visi tersebut mengandung makna terhadap sebuah keinginan yang kuat untuk mewujudkan Kabupaten Tabalong sebagai sebuah daerah yang tatanan masyarakatnya diarahkan kepada masyarakat madani yang beretika dan bermoral serta mampu memenuhi kebutuhan hidup lahir dan batin dengan rasa aman dan nyaman yang didukung

oleh sistem ekonomi, sosial dan budaya yang handal dan dinamis serta mampu bertindak sesuai keadaan dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi secara bijak.

Secara filosofis visi di atas dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya sebagai berikut:

1. **Kabupaten Tabalong yang Lebih Agamais;** merupakan pendekatan membumi melalui pembiasaan dalam rangka mengamalkan nilai-nilai agama pada kalangan masyarakat dan aparatur pemerintah daerah untuk hidup lebih agamais dan modern dalam tatanan sosial kemasyarakatan serta produktif dan bermanfaat dalam bekerja. Nilai-nilai agama yang seharusnya mendapat perhatian tersebut seperti kejujuran, kedisiplinan, musyawarah, keikhlasan, kemandirian, profesionalisme, keadilan, amanah, kebersamaan/persatuan, aspiratif/akomodatif, tawakal dan lain-lain.
2. **Kabupaten Tabalong yang Lebih Sejahtera;** merupakan pendekatan lahiriah untuk mencapai suatu keadaan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup lahir dan batin dengan rasa aman dan nyaman untuk menjadi masyarakat yang lebih baik, makmur, sehat dan damai.
3. **Kabupaten Tabalong yang Lebih Mandiri;** merupakan pendekatan kelembagaan dan profesionalitas dalam rangka perkuatan sistem ekonomi, sosial dan budaya yang handal dan dinamis serta mampu bertindak sesuai keadaan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi secara lebih bijak dengan memaksimalkan potensi ekonomi yang ada seperti sumber daya manusia yang dioptimalkan, pemanfaatan sumber daya alam lokal, dan pemberdayaan lembaga ekonomi yang ada melalui kerja keras dan inovatif.

2.1.2. Misi

Untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati, maka ditetapkan MISI yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun MISI pembangunan yang harus dilaksanakan dalam RPJMD Kabupaten Tabalong tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. **Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Lebih Agamais**

Misi ini mengawal kebijakan pembangunan yang diarahkan agar tercapai masyarakat madani yang beretika dan bermoral melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, memperkuat kelembagaan keagamaan, pendidikan dan kemasyarakatan. Hal pokok yang menjadi pusat perhatian adalah Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga akan terwujud kualitas sumber daya manusia yang berahlak mulia (Tabalong Berkualitas).

2. **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**

Misi ini mengawal pembangunan yang diarahkan agar masyarakat berkemampuan lebih dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan kebutuhan dasar lainnya melalui kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat serta upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian akan terwujud kualitas hidup masyarakat yang peningkatannya dirasakan secara signifikan, serta terjadinya penurunan angka kemiskinan yang nyata (Tabalong Sejahtera).

3. Mewujudkan Kemandirian Daerah

Misi ini mengawal pembangunan yang diarahkan pada tercapainya sistem yang handal dan dinamis yang mampu bertindak sesuai keadaan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi secara bijak melalui penguatan kelembagaan ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan. Dengan kemandirian inilah akan terwujud kemajuan perekonomian daerah yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas (Tabalong Mandiri).

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan pelaksanaan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Perumusan tujuan dan sasaran, selain menerjemahkan visi dan misi juga menjawab permasalahan pembangunan.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Tabalong 2019-2024, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan, sebagai berikut:

Tujuan 1 : Mewujudkan masyarakat dan pemerintahan daerah yang beriman, berkepribadian dan produktif

Sasaran:

1.1: Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan di masyarakat

Tujuan 2 : Memajukan perekonomian daerah yang didukung oleh pengembangan sumber daya alam dan infrastruktur yang berkelanjutan

Sasaran :

2.1. Berkembangnya agribisnis terpadu yang berkelanjutan

2.2. Meningkatkan akses, mobilitas dan kualitas jalan yang menghubungkan seluruh wilayah kabupaten

2.3. Meningkatnya ketahanan pangan daerah

2.4. Meningkatnya kualitas pelayanan dan akses masyarakat terhadap air minum

2.5. Meningkatkan kualitas pembangunan desa

2.6. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

2.7. Meningkatnya pertumbuhan di sektor industri kecil, menengah dan koperasi

2.8. Terkendalinya ketimpangan pendapatan

Tujuan 3: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Sasaran :

3.1 Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial budaya serta penerapan IPTEK secara optimal

3.2 Meningkatkan kesempatan kerja terutama bagi penduduk lokal

3.3 Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sosial

3.4 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3.5 Menurunnya tingkat kemiskinan

Tujuan 4: Mewujudkan pemerintahan daerah yang profesional, transparan dan akuntabel

Sasaran :

4.1. Meningkatnya pengelolaan dan kinerja pemerintahan daerah serta kualitas pelayanan publik.

2.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan

A. Strategi

Berdasarkan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan, maka strategi pembangunan Kabupaten Tabalong tahun 2019 sampai tahun 2024 adalah :

1. Penguatan kerjasama pemerintah dan tokoh agama dalam peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Penguatan keterpaduan sistem pengembangan ketertiban, ketentraman dan kenyamanan;
3. Peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas;
4. Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan yang berkualitas dan merata;
5. Peningkatan ketersediaan pangan berkelanjutan
6. Pengembangan dan peningkatan Sarana dan Prasarana serta kualitas air minum dan sanitasi yang merata

7. Penguatan kapasitas pemerintahan desa dalam kerangka otonomi desa
8. Peningkatan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan
9. Peningkatan akses dan pengembangan sektor industri kecil, menengah, UMKM dan koperasi
10. Peningkatan produktivitas ekonomi sesuai dengan potensi wilayah
11. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
12. Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan
13. Peningkatan pendapatan riil per kapita
14. Peningkatan kualitas kelembagaan sosial kemasyarakatan
15. Pengembangan keberdayaan perempuan dan perlindungan anak
16. Penanggulangan kemiskinan yang terpadu
17. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan public
18. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi secara terpadu untuk mendukung informasi layanan publik dan kota cerdas (Smart City)
19. Perwujudan manajemen perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daera dan pengawasan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

B. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang ditetapkan pada periode tahun 2019 – 2024 merupakan penjabaran dari visi dan misi PRPJMD, tetap tidak terlepas dan harus mengacu pada arah kebijakan yang ada pada Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah (PRPJPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2024.

Misi : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih agamis

Arah Kebijakan

- a. Meningkatkan fungsi dan peran tokoh agama dan lembaga keagamaan untuk mengembangkan kehidupan masyarakat yang agamis;
- b. Pencegahan dan penanggulangan penyakit sosial masyarakat;
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan;

Misi : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Arah Kebijakan

- a. Meningkatkan potensi, kapasitas produksi dan produktivitas pertanian
- b. Mengembangkan agribisnis berbasis keunggulan kompetitif dan komparatif produk daerah
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi
- d. Meningkatkan koordinasi yang sinergi lintas sektor

- dalam pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan
- e. Meningkatkan pengelolaan dan konservasi pengembangan sumber daya air
 - f. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sanitasi
 - g. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan daerah
 - h. Memperkuat kelembagaan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa
 - i. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan potensi SDA yang berwawasan lingkungan
 - j. Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan lahan kritis
 - k. Mendorong upaya penurunan emisi
 - l. Meningkatkan kompetensi dan daya saing usaha koperasi dan UMKM
 - m. Meningkatkan kapasitas manajemen usaha
 - n. Meningkatkan pengembangan IKM
 - o. Memberikan fasilitasi dan kemudahan pengembangan usaha dan permodalan

Misi : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Arah Kebijakan

- a. Meningkatkan aksesibilitas, kualitas pelayanan kesehatan dan peran serta masyarakat

- b. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan
- c. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui peningkatan keahlian, keterampilan dan perlindungan tenaga kerja
- d. Meningkatkan kualitas kelembagaan sosial kemasyarakatan
- e. Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan
- f. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak
- g. Meningkatkan keluarga sejahtera
- h. Pemenuhan hak dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin
- i. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan dan akuntabel
- j. Mensinergikan pendidikan dan pelatihan aparatur ke arah kompetensi individual dan kapasitas kelembagaan
- k. Meningkatkan koordinasi dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana
- l. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi layanan publik berbasis teknologi informasi (TI).
- m. Meningkatkan penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik
- n. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan

- simplikasi perencanaan pembangunan lintas sector
- o. Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah
 - p. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
 - q. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan

2.1.5 Program Prioritas Daerah

Program politik tahun 2020-2024 yang disampaikan kepada masyarakat pada saat kampanye pemilihan kepala daerah, merupakan program utama yang diharapkan mampu mengkreasi lompatan-lompatan ekonomi dengan mewujudkan dan mengawal lokomotif-lokomotif pembangunan ekonomi daerah.

Harapannya, pertumbuhan bukan sekedar tinggi, melainkan juga berkelanjutan dan berkualitas. Hal ini diindikasikan dengan: 1). Pertumbuhan yang dinikmati oleh seluruh masyarakat, dan 2). Ketersediaan akses hasil pembangunan.

Program politik ini akan terdistribusi dan berkontribusi langsung terhadap upaya pencapaian Visi dan Misi jangka menengah daerah sebagai berikut :

A. Upaya pencapaian Misi I Mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih agamais, dilakukan melalui :

1. Peningkatan kesadaran berbudaya dan tertib hukum.

Agar nilai-nilai keagamaan dapat diimplementasikan dengan lebih baik dimasyarakat, masih diperlukan peran pemerintah baik dalam hal pembinaan maupun penegakan hukum. Program terkait peningkatan kesadaran berbudaya dan tertib hukum ini antara lain :

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- b. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
- c. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Melalui program-program tersebut, diharapkan dapat memberikan dampak terhadap penurunan pelanggaran hukum / tindak kriminalitas.

2. Pemantapan implementasi nilai-nilai dasar keagamaan dalam aktivitas pembangunan.

Pemantapan implementasi nilai-nilai dasar keagamaan dalam aktivitas pembangunan dilakukan melalui kegiatan tausiyah yang secara rutin dilakukan di semua organisasi perangkat daerah, menggalakkan shalat berjamaah pada hari kerja ke tempat ibadah terdekat dan Magrib Mengaji.

B. Upaya pencapaian Misi II Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dilakukan melalui :

1. Pemantapan pelaksanaan Gemas Mekar

Pengelolaan peningkatan mutu bahan olahan karet melalui pemantapan pelaksanaan Program Gemas Mekar (Gerakan Masyarakat Meningkatkan Mutu Karet) dengan upaya menambah unit-unit pengolah pemasaran bahan olahan karet terutama diwilayah atau desa potensial penghasil karet, peningkatan pengetahuan dan peran koperasi petani karet dan bantuan permodalan.

2. Revitalisasi pemanfaatan kawasan/area lumbung pangan daerah.

Salah satu sektor yang diharapkan bisa menggeser kontribusi pertambangan terhadap perekonomian daerah adalah sektor pertanian. Maka kawasan lumbung pangan atau yang berpotensi menjadi lumbung pangan daerah harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Program dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- a. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif
- b. Pengendalian banjir
- c. Penyediaan sarana dan prasarana pengairan yang mendukung peningkatan produksi dan produktifitas bahan pangan

3. Memperkuat daya saing produk UMKM

Penguatan daya saing hasil produksi UMKN diupayakan melalui peningkatan kualitas produk, fokus dan konsisten terhadap jenis produk yang dihasilkan, mengamati dan menentukan segmen pasar serta pemanfaatan teknologi informasi.

4. Pengembangan inklusi keuangan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, terutama/termasuk pola Syariah
Meningkatkan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah agar dapat merealisasikan akses langsung pelaku usaha mikro dan kecil terhadap dana bergulir melalui skim syariah tanpa perantara.
5. Optimalisasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur multifungsi.
6. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur ekonomi
Kebijakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur ekonomi dilaksanakan dengan program :
 - a. Pembangunan dan peningkatan (penguatan/perluasan) jalan dan jembatan untuk membuka akses wilayah-wilayah potensial pertanian, perkebunan dan pariwisata.
 - b. Peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan.
 - c. Penataan dan modernisasi pasar-pasar mingguan.
 - d. Penataan pembangunan perumahan berwawasan lingkungan.
 - e. Penataan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
 - f. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan.
 - g. Peningkatan pelayanan angkutan agar dapat menjangkau semua kecamatan.
7. Optimalisasi terwujudnya aktivitas pembangunan yang ramah lingkungan.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan tetap memperhatikan pengaruhnya terhadap lingkungan. Melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup, dilaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mengukur dan memastikan kualitas lingkungan hidup dalam kondisi yang terus mengalami peningkatan. Program yang dilaksanakan antara lain :

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- f. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
- g. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- i. Program Pengelolaan Persampahan

Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yang didalamnya terdiri atas Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Tutupan Lahan.

8. Optimalisasi penerapan Gerakan Pembangunan Masyarakat dalam pembinaan desa

Pembangunan desa dan masyarakat desa diarahkan untuk mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat sehingga mempercepat peningkatan perkembangan desa (desa tertinggal, desa maju dan desa mandiri). Program terkait pembangunan masyarakat dalam pembinaan desa antara lain :

- a. Program Penataan Desa
- b. Program Peningkatan Kerjasama Desa
- c. Program Administrasi Pemerintahan Desa
- d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- e. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

9. Melanjutkan dan menyempurnakan proses pembentukan dan pelaksanaan DANA ABADI.

C. Upaya pencapaian Misi III Mewujudkan Kemandirian Daerah,
dilakukan melalui :

1. Pemantapan pemerataan dan peningkatan aksesibilitas pendidikan murah dan berkualitas.

Pemerintah akan memastikan pendidikan yang berkualitas di semua jenjang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana amanat perundang-undangan bisa diakses oleh semua penduduk melalui program-program, diantaranya :

- a. Program Pengelolaan Pendidikan
- b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- c. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- d. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
- e. Program Pembinaan Perpustakaan
- f. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Termasuk didalamnya adalah penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang memadai dengan memanfaatkan semua potensi pembiayaan yang tersedia baik dari peran serta masyarakat maupun dari unsur pemerintahan yang lebih tinggi.

Melalui program-program tersebut diharapkan terjadi peningkatan partisipasi pendidikan di semua jenjang serta peningkatan angka melek huruf / pengurangan angka buta aksara.

2. Optimalisasi aktivitas pendukung penyelenggaraan pendidikan.

Penyelenggaran pendidikan akan didukung oleh perangkat daerah lain dalam rangka memastikan pelayanan pendidikan bisa diakses oleh masyarakat melalui kegiatan pendukung, antara lain:

- a. Penyediaan prasarana jalan dan jembatan menuju fasilitas pendidikan yang memadai.

- b. Peningkatan penyediaan prasarana angkutan yang murah dan berkualitas.
 - c. Program Pengembangan Perpustakaan
3. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Pemerintah juga akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui program-program antara lain :

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- d. Program Pengendalian Penduduk
- e. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- f. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Melalui program-program tersebut, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dapat dilihat melalui peningkatan usia harapan hidup.

4. Pemantapan pemerataan dan peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan murah dan berkualitas.

Pemerintah juga akan memastikan layanan kesehatan yang berkualitas dapat diakses oleh masyarakat melalui kegiatan :

- a. Penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan menuju fasilitas kesehatan
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan
 - c. Penyediaan obat dan pelayanan kefarmasian
 - d. Penyediaan dana JKN dan Jamkesda
 - e. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
 - f. Program Perawatan dan Pengembangan SDM
5. Pemantapan peningkatan perlindungan sosial masyarakat.

Peningkatan perlindungan sosial masyarakat dilaksanakan melalui program :

- a. Program Pemberdayaan Sosial
- b. Program Rehabilitasi Sosial
- c. Program Penanganan Bencana

Selain itu pemerintah daerah akan meng-adaptasi program Nasional ke dalam kegiatan di daerah dalam bentuk yang lebih luas, seperti pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) menjadi KUBE daerah berdasarkan sektor-sektor ekonomi di masyarakat, kebijakan penyediaan rastra berbasis beras petani lokal. Peningkatan perlindungan sosial masyarakat juga ditempuh dengan kebijakan perluasan layanan masyarakat miskin melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).

6. Tenaga kerja yang andal, terampil dan terlatih

Penyiapan tenaga kerja yang andal, terampil dan terlatih akan dicapai melalui peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja, yang akan dilakukan melalui program-program berikut :

- a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - b. Program Penempatan Tenaga Kerja
 - c. Program Hubungan Industrial
7. Optimalisasi peningkatan PAD.
 8. Optimalisasi pemanfaatan Dana Transfer.

Dana transfer yang diterima pemerintah daerah akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Penyusunan rencana kinerja yang berkualitas, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang akuntabel serta pengawasan dan evaluasi yang baik menjadi hal yang mutlak diperlukan.

Indikator yang menunjukkan pelaksanaan program ini antara lain opini BPK, nilai LPPD dan Nilai SAKIP daerah.

9. Memanfaatkan alternatif pembiayaan.

Berdasarkan pertimbangan bahwa pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dasar perlu ditingkatkan sedangkan alokasi anggaran pada APBD sangat terbatas, maka pemerintah daerah akan memanfaatkan alternatif pembiayaan lain berupa pinjaman daerah sebagaimana diatur oleh perundang-undangan yang berlaku.

10. Peningkatan kapasitas manajemen pemanfaatan dan pemeliharaan aset daerah.
11. Perbaikan tunjangan aparat pemerintah daerah, khususnya yang bertugas didaerah terpencil, serta aparat dan pamong desa.

Berdasarkan hasil evaluasi jabatan dan beban kerja, akan diberikan tunjangan terhadap aparat pemerintah daerah secara proporsional dan sesuai beban kerja masing-masing. Melalui kegiatan ini, diharapkan akan tumbuh rasa keadilan dan mampu meningkatkan etos kerja aparat pemerintah daerah serta diharapkan akan mengurangi/menghilangkan praktek korupsi oleh aparat pemerintah daerah.

12. Pemantapan terwujudnya pemerintah yang melayani masyarakat.

Kualitas pelayanan terhadap masyarakat khususnya pelayanan langsung akan terus dilakukan perbaikan, baik dari segi sumber daya manusia maupun dari segi infrastruktur pendukungnya. Upaya yang dilakukan antara lain pengembangan *Smart City* dan pembangunan mall pelayanan publik. Kualitas pelayanannya akan terus dievaluasi dan diukur berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat.

2.2. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah

komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja tahun 2023 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tabalong
Tahun 2023

Sasaran Strategis 1		
Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan di masyarakat		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Angka Kriminalitas	%	10,5

Sasaran Strategis 2		
Berkembangnya agribisnis terpadu yang berkelanjutan		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Pertumbuhan ekonomi	%	2,2-3,0
Kontribusi pertanian terhadap PDRB	%	11,08

Sasaran Strategis 3		
Meningkatnya akses, Mobilitas dan kualitas jalan yang menghubungkan seluruh wilayah kabupaten		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Persentase desa yang bisa di akses dengan mudah	%	98,35
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	79,3

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya ketahanan pangan daerah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Indeks ketahanan pangan	Indeks	84,03

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya kualitas pelayanan dan akses masyarakat terhadap air minum

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Persentase Penduduk berakses air minum	%	73,45

Sasaran Strategis 6

Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Indeks desa Membangun	Indeks	0,69

Sasaran Strategis 7

Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	71,98

Sasaran Strategis 8

Meningkatnya pertumbuhan di sektor industri kecil, menengah dan koperasi

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Persentase UKM Aktif	%	79
Persentase koperasi aktif	%	82
Kontribusi Industri Terhadap PDRB		

Sasaran Strategis 9

Terkendalinya ketimpangan pendapatan

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Kontribusi perdagangan terhadap PDRB	%	13,89
Indeks Gini	Indeks	0,28-0,31

Sasaran Strategis 10

Meningkatnya Akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial-budaya serta penerapan IPTEK secara optimal

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	74,33
Angka Harapan Hidup	%	70,60
Rata-rata lama sekolah	%	9,69
Harapan lama sekolah	%	14,11

Sasaran Strategis 11

Meningkatnya kesempatan kerja terutama bagi penduduk lokal

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Tingkat pengangguran Terbuka	%	3,0-4,0

Sasaran Strategis 12

Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan social

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Persentase PPKS yang di layani	%	100

Sasaran Strategis 13

Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Indeks pemberdayaan Gender (IDG)	Point	74,25
Indeks pembangunan Gender (IPG)	Point	85,91

Sasaran Strategis 14

Menurunnya tingkat kemiskinan

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Persentase Penduduk miskin	%	5,60

Sasaran Strategis 15

Meningkatnya pengelolaan dan kinerja pemerintah daerah serta kualitas pelayanan publik

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Indeks Reformasi Birokrasi	katagori	80
Nilai SAKIP	katagori	BB

Tingkat Kemandirian daerah	Nilai	16,58
Nilai Surveyt Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Nilai	85
Opini BPK	Pridikat	WTP

2.3. Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam PRPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Tahun 2023

NO	SASARAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN
1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan di masyarakat	5	7
2.	Berkembangnya agribisnis terpadu yang berkelanjutan	10	20
3.	Meningkatnya akses, mobilitas dan kualitas jalan yang menghubungkan seluruh wilayah kabupaten	2	10
4.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	4	6
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akses masyarakat terhadap air minum	2	2
6.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	6	7
7.	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan	11	16

8.	Meningkatnya pertumbuhan di sektor industri kecil, menengah dan koperasi	9	9
9.	Terkendalinya ketimpangan pendapatan	13	23
10.	Meningkatnya Akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial-budaya serta penerapan IPTEK secara optimal	16	41
11.	Meningkatnya kesempatan kerja terutama bagi penduduk lokal	4	7
12.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	3	6
13.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	6	11
14.	Menurunnya tingkat kemiskinan	3	6
15.	Meningkatnya pengelolaan dan kinerja pemerintahan daerah serta kualitas pelayanan publik	34	86

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pemerintah Kabupaten Tabalong selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tabalong dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran tingkat Capaian Kinerja pemerintah Kabupaten Tabalong pada setiap sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 .

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja maka digunakan skala pengukuran kinerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.1.
SKALA NILAI PERANGKAT KINERJA

No	Nilai Angka	Interpretasi
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 tahun 2018

Berdasarkan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/034/2023 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/033/2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tabalong 2019-2024, telah ditetapkan **15 (lima belas) sasaran** dan **27 (dua puluh tujuh) indikator** yang terdapat pada Perjanjian Kinerja, sebagai berikut:

Tujuan 1, dijabarkan kedalam 1 sasaran, dan 1 indikator;

Tujuan 2, dijabarkan kedalam 8 sasaran, dan 12 indikator;

Tujuan 3, dijabarkan kedalam 6 sasaran, dan 9 indikator.

Tujuan 4, dijabarkan kedalam 1 sasaran, dan 5 indikator

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Secara umum Pemerintah Kabupaten Tabalong telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024. Pengukuran target

kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tabalong Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d tahun 2024 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi %			
1	Angka Kriminalitas	Persen	0,01	10,5	10,5	100	10,0	100,5	Sangat Tinggi
2.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,30	2,2-3,0	4,90	163,3	2,5-3,5	140	Sangat Tinggi
3.	Kontribusi pertanian terhadap PDRB	Persen	7,73	11,08	7,71	69,58	11,15	69,14	Sedang
4.	Persentase desa yang bisa di akses dengan mudah	Persen	97,52	98,35	98,35	100	100	98,35	Sangat Tinggi
5.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	78,65	79,30	80,59	101,62	79,80	100,98	Sangat Tinggi
6.	Indeks ketahanan pangan	Persen	82,12	84,03	79,79	94,95	84,72	94,18	Sangat Tinggi
7.	Persentase Penduduk berakses air minum	Indeks	80,85	73,45	82,41	112,19	74,99	109,89	Sangat Tinggi
8.	Indeks desa Membangun	Persen	0,75	0,69	0,78	113,04	0,70	111,42	Sangat Tinggi
9.	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	70,08	71,98	74,03	102,84	72,80	101,68	Sangat Tinggi
10.	Persentase UKM Aktif	Indeks	98,84	79	79	100	82	96,34	Sangat Tinggi
11.	Persentase koperasi aktif	Persen	60	82	59	71,95	86	68,60	Sedang
12.	Kontribusi perdagangan terhadap PDRB	Persen	6,86	13,89	7,51	54,06	15,29	49,11	Sangat Rendah
13.	Indeks Gini	Persen	0,377	0,28-0,31	0,284	91,61	028 - 031	91,61	Sangat Tinggi
14.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persen	73,13	74,33	75,43	100,14	75,07	100,47	Sangat Tinggi
15.	Angka Harapan Hidup	Indeks	70,84	70,60	71,28	100,96	70,73	100,28	Sangat Tinggi
16.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,12	9,69	9,13	94,22	9,93	91,94	Sangat Tinggi
17.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,90	14,11	12,91	91,49	14,46	86,29	Sangat Tinggi
18.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tahun	4,46	3,0-4,0	3,60	90	3,0-4,0	111	Sangat Tinggi
19.	Persentase PPKS yang dilayani	Persen	88,79	100	96,30	96,3	100	96,3	Sangat Tinggi

20.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen	74,65	74,25	74,60	100,47	75,12	99,30	Sangat Tinggi
21.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	85,48	85,91	86,06	100,17	86,10	99,95	Sangat Tinggi
22.	Persentase Penduduk miskin	Indeks	5,87	5,60	5,77	97,05	5,55	96,18	Sangat Tinggi
23.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	58,10	80	77,53	96,91	82	94,54	Sangat Tinggi
24.	Nilai SAKIP	Persen	B	BB	B	B	A	B	Sedang
25.	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	Masih proses audit	Masih proses audit	WTP	WTP	Sangat Tinggi
26.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik	IKM	84,55	85	84,47	99,37	85	99,37	Sangat Tinggi
27.	Tingkat Kemandirian Daerah	Persen	14,28	16,58	11,13	67,12	17,17	64,82	Sedang

Tabel 3.1.2
PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN

No	Interpretasi	Jumlah Sasaran
1.	Sangat Tinggi	21
2.	Tinggi	0
3.	Sedang	4
4.	Rendah	-
5.	Sangat Rendah	1
6.	Data Belum Rilis	1
Jumlah		27

3.2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

**1. Capaian Terhadap Sasaran Strategis 1
Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan di masyarakat**

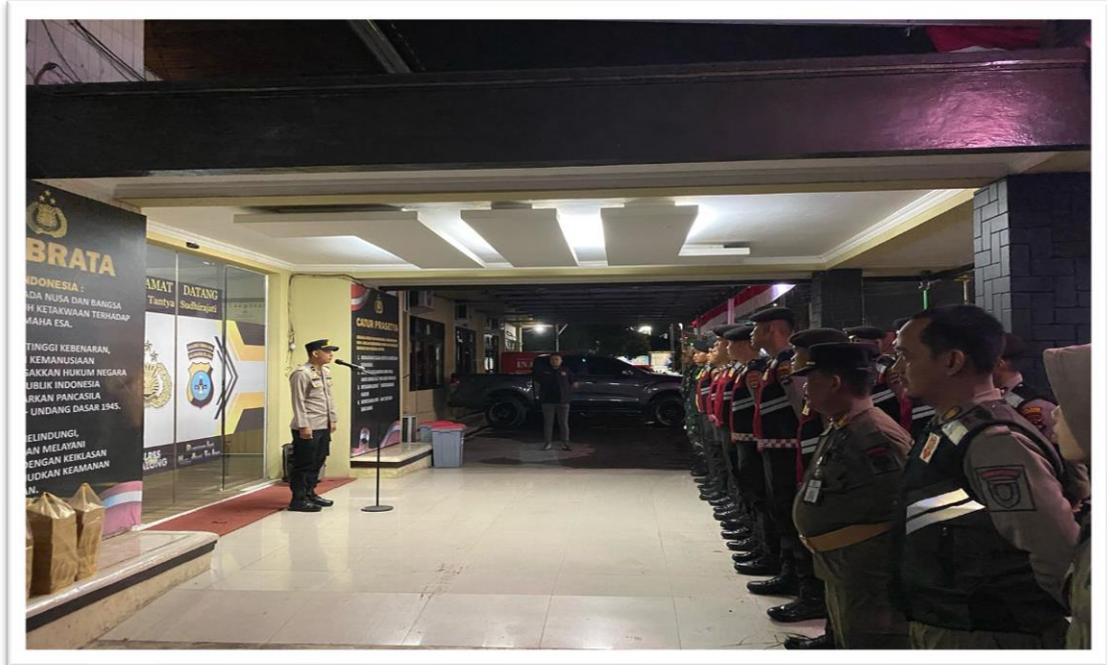
Capaian terhadap sasaran pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan di masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel : 3.2.1.
Meningkatnya Pemahaman Dan Pengamalan Nilai-Nilai
Keagamaan di Masyarakat**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d 2024 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi %		
1.	Angka Kriminalitas	Persen	0,01	10,5	10,5	100	10,0	100,5

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 (satu) indikator kinerja dari sasaran Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan di Masyarakat yaitu indikator kinerja *Angka Kriminalitas* pada tahun 2023 telah melebihi target. Capaian realisasi indikator kinerja tersebut sebesar 100 persen dan dikategorikan dengan skala nilai kinerja **Sangat Tinggi**.

Foto 3.2.1
Sinergitas Lintas Fungsi Oprasi Pekat



Analisis Angka Kriminalitas

1. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 , angka kriminalitas di Kabupaten Tabalong ditargetkan sebesar 10,5. Pada tahun 2023 di Kabupaten Tabalong terdapat kasus kriminal sebanyak 26 kasus dengan jumlah penduduk sebesar 262.631 jiwa, sehingga angka kriminalitas di Kabupaten Tabalong sebesar 10,5 persen. Dibandingkan dengan target dalam Perjanjian Kinerja, capaian realisasi kinerja untuk angka kriminalitas sebesar 100 persen.

2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni di tahun 2022, angka kriminalitas di Kabupaten Tabalong sebesar 0,01 persen, sedangkan di tahun 2023 sebesar 100 persen, sehingga dari tahun 2023 hingga tahun 2022 terjadi penurunan angka kriminalitas sebesar 99 persen.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target RPJMD tahun 2019-2024

Realisasi kinerja indikator angka kriminalitas tahun 2023 sebesar 100 persen. Dibandingkan dengan target akhir pada RPJMD sebesar 10,0 persen, sehingga capaian kinerja indikator angka kriminalitas terhadap RPJMD 2019-2024 hingga tahun 2023 sebesar 100,5 persen.

4. Analisis penyebab keberhasilan.

Keberhasilan pencapaian kinerja tidak terlepas adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung program kegiatan dari APBD Kabupaten tabalong tahun anggaran 2023. Hal yang mendasari keberhasilan tersebut yaitu:

- a. Partisipasi petugas linmas dan masyarakat;
 - b. Memberikan pelatihan kepada relawan siaga bencana kebakaran;
 - c. Meningkatnya sinergitas lintas organisasi perangkat daerah dan Lembaga-lembaga/ potensi lainnya terkait penyelesaian keamanan, ketertiban, dan ketentraman lingkungan;
 - d. Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menjaga kemandirian, ketertiban dan ketentraman lingkungan.
5. Analisa efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai
- Untuk mencapai tujuan angka kriminalitas di Kabupaten Tabalong, maka diperlukan Sumber Daya yang memadai berupa :

1. Sumber Daya Aparatur

2. Sarana dan prasarana yang memadai

Tabel : 3.2.2
Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/kelebihan	Tindak lanjut
SDM sesuai persyaratan jabatan dalam anjab	Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan saat ini sebanyak 27 orang sama dengan tahun sebelumnya	Masih dibutuhkannya 4 orang SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan fungsional	Mengisi kekurangan jabatan fungsional yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan
Tercukupinya sarana prasarana kerja untuk mendukung	Sarana prasarana yang mendukung saat ini belum cukup memadai	Masih membutuhkan sarana dan prasarana	Mengajukan usulan pengadaan barang

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah di capai, telah dilaksanakan kegiatan dan program yang melibatkan beberapa pihak seperti penggunaan pihak ke 3 (tiga), tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai pemateri, tim penilai, pemberi masukan, dan kerja sama dengan pihak swasta dalam mencapai indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja.

6. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

Untuk menekan laju angka kriminalitas di kabupaten Tabalong didukung dengan 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan :

- Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
 - b. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum.
 - c. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia.
 - d. Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
- Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan Bupati/Wali Kota
 - a. Sosialisasi Penegakan Perda Dan Peraturan Bupati/Wali kota.
 - b. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Bupati / Wali Kota.
 - c. Penanganan atas pelanggaran perda dan perbup.

2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Kegiatan :

- Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten/kota
- Inspeksi peralatan proteksi kebakaran
 - a. Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran.

2. Capaian Terhadap Sasaran Strategis 2 Berkembangnya Agribisnis Terpadu yang Berkelanjutan

Adapun capaian terhadap sasaran berkembangnya agribisnis terpadu yang berkelanjutan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel : 3.2.3
Berkembangnya Agribisnis Terpadu yang Berkelanjutan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d 2024 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)		
1.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,30	2,2-3,0	4,90	163,3	2,5-3,5	140
2.	Kontribusi pertanian terhadap PDRB	Persen	7,73	11,08	7,71	69,58	11,15	69,14

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 (dua) indikator kinerja dari sasaran Berkembangnya Agribisnis Terpadu yang Berkelanjutan yaitu Pertumbuhan Ekonomi dengan capaian realisasi sebesar 4,90 dengan skala nilai **Sangat Tinggi** dan indikator kinerja Kontribusi Pertanian terhadap PDRB tahun 2023 dengan capaian realisasi sebesar 7,71 persen dengan skala nilai **sedang**.

Foto 3.2.2 Bantuan Alat Pertanian



A. Analisis Capaian Terhadap Target Indikator Kinerja

1. Indikator Kinerja : Pertumbuhan Ekonomi

- 1) Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2023 untuk Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tabalong adalah 2,2-3,0 persen.
- 2) Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Tabalong tahun 2023, Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tabalong sebesar 4,90 persen, dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebesar 2,2-3,0 persen, sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 163,3 persen
- 3) Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni di tahun 2022, Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tabalong sebesar 5,30 persen, sedangkan di tahun 2023 sebesar 4,90 persen, sehingga

dari tahun 2022 hingga 2023 terjadi penurunan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,4 persen.

- 4) Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, target akhir pada tahun 2024 untuk Pertumbuhan Ekonomi sebesar 2,5-3,5 persen. Dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 4,90 persen, capaian kinerja terhadap target pembangunan jangka menengah untuk Kontribusi Pertanian terhadap PDRB hingga tahun 2023 sebesar 140 persen.

2. Indikator Kinerja : Kontribusi Pertanian terhadap PDRB

- 1) Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2023 untuk Kontribusi Pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Tabalong adalah 11,08 persen.
- 2) Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Tabalong tahun 2023 , Kontribusi Pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Tabalong sebesar 7,71 persen, dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebesar 11,08 persen, sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 69,58 persen
- 3) Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni di tahun 2022, Kontribusi Pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Tabalong sebesar 7,73 persen, sedangkan di tahun 2023 sebesar 7,71 persen, sehingga dari tahun 2022 hingga 2023 terjadi penurunan Kontribusi Pertanian terhadap PDRB sebesar 0,2 persen.

- 4) Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, target akhir pada tahun 2024 untuk Kontribusi Pertanian terhadap PDRB sebesar 11,15 persen. Dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 7,71 persen, capaian kinerja terhadap target pembangunan jangka menengah untuk Kontribusi Pertanian terhadap PDRB hingga tahun 2023 sebesar 69,14 persen.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Dalam pencapaian sasaran Berkembangnya Agribisnis Terpadu yang Berkelanjutan, telah dilaksanakan beberapa upaya meliputi sektor pertanian dan perdagangan serta didukung dengan pembangunan maupun pemeliharaan operasional prasarana dan sarana.

Di sektor pertanian, pada tahun 2023 terdapat beberapa indikator yang mengalami peningkatan persentase capaian yakni kinerja produksi dan produktivitas peternakan dengan nilai capaian % dan diikuti oleh kinerja produksi dan produktivitas hortikultura dengan nilai capaian 297%. Peningkatan capaian sektor peternakan dan komoditi hortikultura merupakan dampak dari semakin meningkatnya minat peternak dan petani pada sektor ini, serta diimbangi pula dengan berbagai kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten yang telah diprogramkan dan dijalankan Dinas Pertanian. Selain itu berbagai kegiatan tugas pembantuan yang diberikan terutama untuk sektor hortikultura oleh Bank Indonesia dan Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Hortikultura juga turut mendukung peningkatan capaian tersebut.

Namun demikian terjadi pula penurunan capaian kinerja sektor tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai) hingga nilai persentase capaian hanya sebesar 48%. Penurunan terbesar terjadi pada komoditi jagung dan kedelai. Hal ini disebabkan oleh minat petani yang menurun pada dua komoditi ini. Petani memilih beralih pada komoditi hortikultura. Penurunan juga terjadi pada produksi padi. Hal ini disebabkan oleh alih fungsi lahan sawah menjadi komoditi pertanian lainnya maupun alih fungsi lahan akibat pertumbuhan penduduk yang mengubah fungsi sawah menjadi pemukiman.

Penurunan capaian kinerja juga terjadi pada sektor perkebunan. Berdasarkan laporan mantri perkebunan dan penyuluh pertanian lapangan dari pengaduan kelompok tani, hal ini diakibatkan oleh gangguan dari penyakit jamur akar putih dan penyakit gugur daun. Rentannya klon yang banyak dibudidayakan oleh rakyat terhadap serangan penyakit ini juga menjadi salah satu pemicu munculnya penyakit tersebut. Selain itu tingkat pengetahuan petani dalam pengendalian penyakit masih cukup rendah. Sehingga kegiatan peremajaan karet dan pelatihan pengendalian penyakit serta organisme pengganggu tanaman lainnya menjadi relevan untuk perlu diprogramkan pada tahun anggaran berikutnya (2023).

Di bidang perikanan, realisasi jumlah produksi perikanan tangkap yang ramah lingkungan pada tahun 2023 adalah sebesar 1.865,52 ton atau dengan capaian sebesar 97,45% dari target. Target produksi perikanan tangkap terlampaui karena pada tahun 2020 dan tahun 2023

telah dilaksanakan hibah peralatan penangkapan ikan ramah lingkungan seperti perahu bermotor, lukah (bubu), rengge (jaring insang), tempirai, dan lunta (jaring tebar). Adapun realisasi jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun 2023 adalah sebesar 15.378,95 ton atau dengan capaian sebesar 100,03% dari target. Realisasi target produksi ikan budidaya tercapai lebih dari 100% karena pada tahun 2023 terjadi musim penghujan yang lama. Musim penghujan mengakibatkan tercukupinya volume air sungai yang dipergunakan untuk karamba atau volume air cekdam yang dipergunakan untuk pengairan kolam ikan. Selain itu juga para pembudidaya ikan mempersingkat siklus produksi budidaya perikanan.

Sedangkan realisasi jumlah kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan adalah 3 kali atau dengan capaian sebesar -300,00%. Target ini tidak terpenuhi karena masih ada ditemukan kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan di Kecamatan Tanjung, Kelua dan Banua Lawas. Untuk kedepannya dalam rangka mengendalikan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan maka akan ditingkatkan beberapa tindakan atau kegiatan seperti peningkatan jumlah sosialisasi UU / Perda Perikanan, peningkatan kegiatan pemantauan / razia di lapangan, peningkatan jumlah personil pemantauan dan peningkatan sarana dan prasarana pengawasan perikanan.

Dari jumlah produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 31 ton atau dengan capaian

111,91% dari target. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 telah dilaksanakan 5 (lima) kali bimbingan teknis pengolahan dan diversifikasi hasil perikanan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tabalong yang mengakibatkan meningkatnya minat masyarakat untuk mengolah makanan berbahan dasar ikan dalam bentuk yang bervariasi.

Di sektor perdagangan, tahun 2023 fokus pada kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan serta pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan, menjamin ketersediaan, pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, serta penyelenggaraan promosi dagang.

Namun terdapat beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaannya. Pada sarana distribusi perdagangan, banyaknya jumlah pasar yang memerlukan pemeliharaan sehingga anggaran tidak dapat terfokus pada pemenuhan kriteria SNI pada pasar tipe A. Selain itu belum disusunnya SOP pada pengelolaan pasar sehingga sering kali abai terhadap permasalahan yang muncul dan tidak memahami tupoksi masing-masing. Pada informasi harga dan stok bahan pokok, pemantauan informasi harga dan stok bahan pokok dan penting belum bisa dilaporkan lengkap di 12 Kecamatan. Sedangkan pada promosi dagang, belum maksimalnya produk unggulan daerah untuk mencapai standar ekspor, dan ditambah adanya pembatasan kegiatan pada masa pandemi Covid-19 yang tidak mengizinkan untuk melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang.

C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil Kinerja yang telah Dicapai

Untuk mencapai sasaran Berkembangnya Agribisnis Terpadu yang Berkelanjutan, maka diperlukan sumber daya yang memadai berupa :

1. Sumber daya yang kompeten
2. Sarana dan prasarana yang memadai

Adapun tabel analisis penggunaan sumber daya disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.4
Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
SDM yang diperlukan sesuai persyaratan jabatan dalam analisis jabatan	Terdapat SDM yang belum sesuai persyaratan jabatan saat ini	Masih dibutuhkan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan
Sumber dana yang dapat menuntaskan semua permasalahan dalam pencapaian sasaran berkembangnya agribisnis terpadu yang berkelanjutan	Saat ini sumber dana belum mencukupi dalam pencapaian sasaran sehingga memerlukan biaya dari berbagai sumber baik APBN maupun APBD	Masih membutuhkan sumber dana/anggaran yang dapat mendukung tujuan dan sasaran	Mengusulkan anggaran ke bagian anggaran / TAPD
Tercukupinya sarana dan prasarana kerja yang mendukung	Sarana dan prasarana yang mendukung operasional saat ini belum dapat dipergunakan secara optimal karena	Perlu adanya dukungan dana untuk operasional	Membuat usulan biaya operasional

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/ Kelebihan	Tindak Lanjut
operasional kegiatan	terbatasnya biaya operasional yang dibutuhkan		

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai, telah dilaksanakan kegiatan dan program yang melibatkan beberapa pihak seperti penggunaan pihak ke 3 (tiga), tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai pemateri, tim penilai, pemberi masukan, dan kerja sama dengan pihak swasta dalam mencapai indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja.

Penggunaan Sumber Daya Manusia yang efisien menjadi prioritas dalam pelaksanaan program

dan kegiatan tahun 2023 pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan

Hortikultura (DKPPTPH) Kabupaten Tabalong untuk mencapai sasaran – sasaran strategis pada tahun

2023. DKPPTPH pada tahun 2023 memiliki 130 (seratus tiga puluh) orang ASN terdiri dari 99

(sembilan puluh sembilan) orang PNS dan 31 (tiga puluh satu) orang PPPK. Selain ASN, pada

DKPPTPH Kabupaten Tabalong tahun 2023 juga terdapat 55 (lima puluh lima) orang Tenaga Kontrak

yang membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pada Sekretariat, Bidang – Bidang dan UPT.

Jumlah PNS sebanyak 130 orang tersebut dirasakan masih kurang mencukupi dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. Semua PNS yang ada telah melaksanakan rangkap pekerjaan sehari-hari baik yang sifatnya administratif maupun teknis agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan benar dan tepat waktu. Sebagai SKPD teknis yang membidangi Ketahanan Pangan, Perikanan serta Tanaman Pangan dan Hortikultura maka DKPPTPH masih kekurangan pegawai. Semoga pada waktu yang akan datang Pemerintah Kabupaten Tabalong dapat menyediakan PNS tambahan untuk DKPPTPH agar kekurangan kebutuhan tenaga PNS tersebut dapat dipenuhi sehingga pelaksanaan tugas dapat dilakukan dengan lebih mudah dan ringan untuk mencapai sasaran – sasaran strategis

3. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Dalam upaya pencapaian sasaran Berkembangnya Agribisnis Terpadu yang Berkelanjutan, didukung oleh 15 (lima belas) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan kegiatan :
 - a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota
 - c. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota lain

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan kegiatan :
 - a. Pengembangan prasarana pertanian
 - b. Pembangunan prasarana pertanian
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan kegiatan :
 - a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dengan kegiatan :
 - a. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota
5. Program Perizinan Usaha Pertanian, dengan kegiatan :
 - a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah Kabupaten/Kota
6. Program Penyuluhan Pertanian, dengan kegiatan :
 - a. Pelaksanaan penyuluhan pertanian
7. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, dengan kegiatan :
 - a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota

- b. Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten / Kota
8. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, dengan kegiatan :
 - a. Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil
 - b. Pengelolaan pembudidayaan ikan
9. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan kegiatan :
 - a. Pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten / Kota
10. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dengan kegiatan :
 - a. Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil
 - b. Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota
11. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan kegiatan :
 - a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan
 - b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya
12. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, dengan kegiatan :
 - a. Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan

13. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, dengan kegiatan :
 - a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan
 - b. Penerbitan tanda daftar gudang
 - c. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat
14. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dengan kegiatan :
 - a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Kabupaten/ Kota
 - b. Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota
15. Program Pengembangan Ekspor, dengan kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

**3. Capaian Terhadap Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Akses Mobilitas dan Kualitas Jalan yang
Menghubungkan seluruh Wilayah Kabupaten**

Adapun capaian terhadap sasaran Meningkatkan Akses Mobilitas dan Kualitas Jalan yang Menghubungkan seluruh Wilayah Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 3.2.5
Meningkatnya Akses Mobilitas dan Kualitas Jalan yang
Menghubungkan seluruh Wilayah Kabupaten

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d 2024
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi %		
1.	Persentase desa yang bisa di akses dengan mudah	Persen	97,52	98,35	98,35	100	100	98,35
2.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	78,65	79,30	80,59	101,62	79,8	100,98

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 (dua) indikator kinerja dari sasaran Meningkatkan Akses Mobilitas dan Kualitas Jalan yang Menghubungkan seluruh Wilayah Kabupaten yaitu indikator kinerja Persentase desa yang bisa di akses dengan mudah, dan indikator kinerja Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap, pada tahun 2023 telah mencapai target. Capaian realisasi kedua indikator kinerja ini dikategorikan dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.

Foto 3.2.3
Jalan Desa dan Jalan Kabupaten



A. Analisis Capaian Terhadap Target Indikator Kinerja

- 1) Indikator Kinerja : Persentase desa yang bisa di akses dengan mudah
 - a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2023 untuk Persentase desa yang bisa di akses dengan mudah di Kabupaten Tabalong adalah 98,35 persen.
 - b. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong tahun 2023 , Persentase desa yang bisa di akses dengan mudah di Kabupaten Tabalong sebesar 98,35 persen, dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebesar 98,35 persen, sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 100 persen.
 - c. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni di tahun 2022, Persentase desa yang bisa diakses dengan mudah di Kabupaten Tabalong sebesar 98,35 persen, dan di tahun 2023 masih sebesar 98,35 persen.
 - d. Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, target akhir pada tahun 2024 untuk Persentase desa yang bisa di akses dengan mudah sebesar 100 persen. Dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 98,35 persen, capaian kinerja terhadap target pembangunan jangka menengah untuk Persentase desa yang bisa di akses dengan mudah hingga tahun 2023 sebesar 98,35 persen.
- 2) Indikator Kinerja : Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap

- a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2023 untuk Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap adalah 79,30 persen.
- b. Pada tahun 2023, Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap sebesar 80,59 persen, dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebesar 79,30 persen, sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 100,98 persen.
- c. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni tahun 2022, Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap sebesar 78,65 persen, sedangkan di tahun 2023 sebesar 80,59 persen, sehingga dari tahun 2022 hingga 2023 terjadi peningkatan persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap sebesar 1,94 persen.
- d. Dibandingkan dengan target sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, target akhir pada tahun 2024 untuk Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap sebesar 79,80 persen. Dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 80,59 persen, capaian kinerja terhadap target pembangunan jangka menengah untuk Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap hingga tahun 2023 sebesar 100,98 persen.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Akses Mobilitas Dan Kualitas Jalan Yang Menghubungkan Seluruh Wilayah Kabupaten, telah dilaksanakan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang yang komprehensif beserta pengendaliannya pemanfaatanya ruang.
2. Pembangunan jaringan jalan dan jembatan yang berorientasi untuk menghubungkan poros kecamatan dan pusat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.
3. Peningkatan konstruksi jembatan kayu menjadi betonisasi atau rangka baja.
4. Memepertahankan kondisi jalan dan jembatan tetap baik dengan melakukan pemeliharaan jalan dan jembatan.
5. Pembangunan dan peningkatan prasarana air bersih di perkotaan dan perdesaan.
6. Pembangunan,peningkatan dan pemeliharaan prasarana air agar tetap berfungsi sesuai peruntukannya bagi aktivitas pertanian untuk mendukung ketahanan pangan.
7. Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pelayanan publik lainnya.
8. Persentase penerapan RTRW yang sesuai peruntukannya.
9. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dan pembinaan terhadap penyediaan jasa konstruksi.
- 10.Melakukan pengawasan terhadap konstruksi pembangunan pada penyediaan material yang berkualitas.

11. Peningkatan peralatan di bidang ke-PU an untuk mendukung pelaksanaan konstruksi.
12. Peningkatan keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia aparatur pekerjaan umum melalui pelatihan dan bimbingan teknis bidang ke-PU an.
13. Melakukan peningkatan kualitas monitoring, evaluasi dan pelaporan sehingga nilai evaluasi AKIP meningkat.

C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil Kinerja yang telah Dicapai

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Akses Mobilitas dan Kualitas Jalan yang Menghubungkan seluruh Wilayah Kabupaten, maka diperlukan sumber daya yang memadai berupa :

1. Sumber daya yang kompeten
2. Pendanaan
3. Sarana dan prasarana yang memadai

Adapun tabel analisis penggunaan sumber daya disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.6
Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM Sesuai persyaratan jabatan dalam	Jumlah SDM sesuai jabatan struktural saat ini sebanyak 29	Mebutuhkan 1 orang SDM yang kompeten pada kelas jabatannya serta persyaratan	Mengisi kekurangan/kekosongan jabatan yang ada dengan

<p>anjab (Jab.Struktural sebanyak 30 orang) dan (Jab. Pelaksana/Fungsional Umum sebanyak 80 orang).</p>	<p>orang (ada 1 jabatan yg tanpa ada orangnya),dan jabatan Pelaksana/Fungsional Umum sebanyak 35 orang ditambah CPNS sebanyak 2 orang.</p>	<p>jabatan yang sesuai untuk jab struktural.dan membutuhkan 34 orang SDM yang berkompeten pada kelas jabatannya untuk jab.pelaksana/fungsional umum.</p>	<p>mengangkat tenaga teknis dan non teknis yang kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik.</p>
<p>Memadukan kegiatan kegiatan personalia dan tujuan tujuan organisasi diwaktu yang akan datang secara efektif dan efisien.</p>	<p>Masih ada kesenjangan personalia dengan kegiatan dan tujuan organisasi.</p>	<p>Membutuhkan bimbingan dan arahan sikap dan perilaku dalam mempercepat pencapaian tujuan dan hasil kinerja.</p>	<p>pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk membuat kinerja pegawai semakin meningkat,pengetahuan,keahlian,dan sikap/perilaku seiring dengan peningkatan kariernya.</p>

Tercukupinya sarana dan prasarana kerja untuk mendukung kinerja organisasi	Sarana dan prasarana yang mendukung saat ini belum cukup memadai	Masih membutuhkan sarana dan prasarana untuk menunjang operasional organisasi	Mengajukan usulan permintaan pengadaan barang
--	--	---	---

D. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong dalam upaya pencapaian sasaran Meningkatnya Akses Mobilitas dan Kualitas Jalan yang Menghubungkan seluruh Wilayah Kabupaten, yaitu melalui Program Penyelenggaraan Jalan, dengan kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.

4. Capaian Terhadap Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

Adapun capaian terhadap sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel : 3.2.7
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d 2024 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	82,12	84,03	79,79	94,95	84,72	94,18

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja dari sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah yaitu Indeks Ketahanan Pangan pada tahun 2023 belum mencapai target. Namun, capaian realisasi indikator kinerja tersebut sebesar 79,79 persen dikategorikan dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.

Foto 3.2.4
Kampung Hortikultura di Desa Catur Karya



Analisis Indeks Ketahanan Pangan

1. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, indeks ketahanan pangan di Kabupaten Tabalong ditargetkan sebesar 84,03. Realisasi di tahun 2023, perolehan indeks ketahanan pangan sebesar 79,79. Dibandingkan dengan target dalam Perjanjian Kinerja, capaian realisasi kinerja untuk indeks ketahanan pangan sebesar 94,95 persen.

2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni di tahun 2022, indeks ketahanan pangan di Kabupaten Tabalong sebesar 82,12 sedangkan di tahun 2023 sebesar 79,79, sehingga dari tahun 2022 hingga tahun 2023 terjadi penurunan indeks ketahanan pangan sebesar 2,33 persen.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target RPJMD Tahun 2019-2024

Realisasi kinerja indikator indeks ketahanan pangan tahun 2023 sebesar 79,79. Dibandingkan dengan target akhir pada RPJMD sebesar 84,72, capaian kinerja indikator indeks ketahanan pangan terhadap target RPJMD 2019-2024 hingga tahun 2023 sebesar 994,18 persen.

4. Analisis penyebab keberhasilan

Dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan, terdapat beberapa upaya yang menunjukkan keberhasilan.

Jumlah cadangan beras Pemerintah di tahun 2023 sebesar 35 ton dari target sebesar 30 ton. Hal ini didukung dengan adanya komitmen pimpinan daerah termasuk DPRD yang berperan dalam penganggaran dalam pengadaan beras untuk meningkatkan cadangan pangan daerah, serta adanya program dan kegiatan yang didanai oleh APBN dan APBD Provinsi melalui kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). Selain itu, produksi beras lokal di Kabupaten Tabalong melebihi (surplus) dibanding kebutuhan pangan masyarakat sehingga kelebihan produksi tersebut sebagian bisa dialokasikan sebagai cadangan pangan.

Jumlah desa rentan/rawan pangan menjadi desa tahan pangan di tahun 2023 ada sebanyak 5 desa dari target 4 desa. Hal ini didukung dengan tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan Kabupaten Tabalong di tahun sebelumnya yang membantu dalam memetakan desa rawan pangan sehingga menjadi bahan atau prioritas dalam pengambilan kebijakan pembangunan di tahun berikutnya.

5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai

Untuk mencapai target indeks ketahanan pangan di Kabupaten Tabalong, maka diperlukan sumber daya yang memadai berupa :

1. Sumber daya yang kompeten
2. Sarana dan prasarana yang memadai

Tabel 3.2.8
Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
SDM yang diperlukan sesuai persyaratan jabatan dalam analisis jabatan	Terdapat SDM yang belum sesuai persyaratan jabatan saat ini	Masih dibutuhkan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan
Tercukupinya sarana dan prasarana kerja yang mendukung operasional kegiatan	Sarana dan prasarana yang mendukung operasional saat ini belum dapat dipergunakan secara optimal karena terbatasnya biaya	Perlu adanya dukungan dana untuk operasional	Membuat usulan biaya operasional

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/ Kelebihan	Tindak Lanjut
	operasional yang dibutuhkan		

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai, telah dilaksanakan kegiatan dan program yang melibatkan beberapa pihak seperti penggunaan pihak ke 3 (tiga), tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai pemateri, tim penilai, pemberi masukan, dan kerja sama dengan pihak swasta dalam mencapai indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja.

6. Analisa program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

Dalam upaya pencapaian target indeks ketahanan pangan di Kabupaten Tabalong, didukung oleh 4 (empat) program dan 6 (enam) kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan : penyediaan infrastruktur lumbung pangan; dan penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya.
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan kegiatan :
 - a. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

- b. Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/Kota.
 - c. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan, dengan kegiatan :
 - a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan
 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan, dengan kegiatan :
 - a. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota.

5. Capaian Terhadap Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Air Minum

Adapun capaian terhadap sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Air Minum dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 3.2.9
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Air Minum

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d 2024 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	80,85	73,45	82,41	112,19	74,99	109,89

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja dari sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Air

Minum yaitu Persentase Penduduk Berakses Air Minum pada tahun 2023 telah melebihi target. Capaian realisasi indikator kinerja tersebut sebesar 112,19 persen dikategorikan dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.

Foto 3.2.5
Pemasangan Air Bersih
Analisis Persentase Penduduk Berakses Air Minum



1. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja
Sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 , persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Tabalong ditargetkan sebesar 73,45. Realisasi di tahun 2023 , persentase penduduk berakses air minum sebesar 82,41. Dibandingkan dengan target dalam Perjanjian Kinerja, capaian realisasi kinerja untuk persentase penduduk berakses air minum sebesar 112,19 persen.
2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022
Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni di tahun 2022, persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Tabalong

sebesar 80,85 persen sedangkan di tahun 2023 sebesar 82,41, sehingga dari tahun 2022 hingga tahun 2023 terjadi peningkatan persentase penduduk berakses air minum sebesar 1,56 persen.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target RPJMD Tahun 2019-2024

Realisasi kinerja indikator persentase penduduk berakses air minum tahun 2023 sebesar 80,85. Dibandingkan dengan target akhir pada RPJMD sebesar 74,99, capaian kinerja indikator persentase penduduk berakses air minum terhadap target RPJMD 2019-2024 hingga tahun 2023 sebesar 109,89 persen.

4. Analisis penyebab keberhasilan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Air Minum dengan indikator persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Tabalong, terdapat beberapa upaya yang menunjukkan keberhasilan.

5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai

Untuk mencapai target persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Tabalong, maka diperlukan sumber daya yang memadai berupa :

1. Sumber daya yang kompeten
2. Sarana dan prasarana yang memadai

Tabel 3.2.10
Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
SDM yang diperlukan sesuai persyaratan jabatan dalam analisis jabatan	Terdapat SDM yang belum sesuai persyaratan jabatan saat ini	Masih dibutuhkan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan
Tercukupinya sarana dan prasarana kerja yang mendukung operasional kegiatan	Sarana dan prasarana yang mendukung operasional saat ini belum dapat dipergunakan secara optimal karena terbatasnya biaya operasional yang dibutuhkan	Perlu adanya dukungan dana untuk operasional	Membuat usulan biaya operasional

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai, telah dilaksanakan kegiatan dan program yang melibatkan beberapa pihak seperti penggunaan pihak ke 3 (tiga), tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai pemateri, tim penilai, pemberi masukan, dan kerja sama dengan pihak swasta dalam mencapai indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja.

- Analisa program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

Dalam upaya pencapaian target persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Tabalong, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong melaksanakan Program Pengelolaan dan

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, melalui kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota.

6. Capaian Terhadap Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa

Adapun capaian terhadap sasaran Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel : 3.2.11
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d 2024
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi %		
1.	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,75	0,69	0,78	113,04	0,70	111,42

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja dari sasaran Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa yaitu Indeks Desa Membangun dengan capaian kinerja tercapai. Capaian realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2023 dikategorikan dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.

A. Analisis Capaian Terhadap Target Indikator Kinerja

Indikator Kinerja : Indeks Desa Membangun

- Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2023 untuk Indeks Desa Membangun adalah 0,69.
- Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong tahun 2023 , Indeks Desa Membangun sebesar 0,78, dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebesar 0,69

persen, sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 113,04 persen.

- c. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni di tahun 2022, Indeks Desa Membangun terealisasi sebesar 0,75, sedangkan di tahun 2023 sebesar 0,78.
- d. Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, target akhir pada tahun 2024 untuk Indeks Desa Membangun sebesar 0,70. Dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 0,78, capaian kinerja terhadap target pembangunan jangka menengah untuk Indeks Desa Membangun hingga tahun 2023 sebesar 111,42 persen.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa, telah dilaksanakan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Melakukan Koordinasi antar SKPD di Kabupaten Tabalong yang memiliki kewenangan di Desa untuk meningkatkan status IDM Desa di Kabupaten Tabalong
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa yang dimana dilaksanakan rutin setiap tahun
3. Melakukan koordinasi dengan Tenaga Ahli yang mengurus IDM Desa untuk dapat memberikan arahan dan masukan untuk peningkatan IDM Desa

C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil Kinerja yang telah Dicapai

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa berupa :

1. Sumber daya yang kompeten
2. Pendanaan
3. Sarana dan prasarana yang memadai

Adapun tabel analisis penggunaan sumber daya disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.12
Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan / Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam anjab sebanyak 30 orang	Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan saat ini sebanyak 25 orang	Masih dibutuhkan 5 orang SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan melakukan penerimaan CPNS
Tercukupinya sarana prasarana kerja untuk mendukung	Sarana prasarana yang mendukung saat ini belum cukup memadai	Masih membutuhkan sarana dan prasarana	Mengajukan usulan pengadaan barang

D. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

1. Program Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa

- a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
2. Program Penataan Desa
 - a. Penyelenggaraan Penataan Desa
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
 - a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - a. Fasilitasi Kerjasama antar Desa
Program dan kegiatan di atas telah menyesuaikan dengan analisis cascading perangkat daerah.

**7. Capaian Terhadap Sasaran Strategis 7
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan**

Adapun capaian terhadap sasaran Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.13
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d 2024 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi %		

1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	70,08	71,98	74,03	102,84	72,80	101,68
----	----------------------------------	--------	-------	-------	-------	--------	-------	--------

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Pencapaian kinerja sejauh ini di Kabupaten Tabalong bisa dikatakan berhasil dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2023 capaian kinerja sebesar 74,03 dari target sebesar 71,98 dengan realisasi capaian kinerja sebesar 102,84 persen , dapat dimasukkan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.

- a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja
 Sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 , Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Tabalong di targetkan sebesar 71,98. Pada tahun 2023 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 74,03 Dibandingkan dengan target dalam Perjanjian Kinerja, capaian realisasi kinerja untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 102,84 persen.
- b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022
 Realisasi kinerja dari tahun 2022 sebesar 70,08, sedangkan tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 74,03 dengan capaian kinerja sebesar 102,84 persen.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target RPJMD tahun 2019-2024

Realisasi kinerja indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2023 sebesar 74,03. Di bandingkan dengan target akhir pada RPJMD sebesar 72,80, sehingga capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terhadap RPJMD 2019-2024 hingga tahun 2023 sebesar 101,68 persen.

- d. Analisa penyebab keberhasilan.

Penyebab keberhasilan sejauh ini di Kabupaten Tabalong bisa dikatakan berhasil, ada beberapa faktor pendukungnya yang mempengaruhinya antara lain :

- a) Melakukan Uji kualitas air dan udara di wilayah Kabupaten Tabalong secara rutin;
 - b) Pendampingan PROPER pada pengusaha kegiatan dilakukan secara berkelanjutan bagi perusahaan diwilayah Kabupaten Tabalong baik tingkat regional maupun Nasional;
 - c) Melaksanakan penyuluhan dan pengendalian terhadap pencemaran air dan udara kepada masyarakat melalui sosialisasi, koordinasi, komunikasi dan konsultasi dengan instansi terkait;
 - d) Melakukan koordinasi, komunikasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian sasaran.
- e. Analisa efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai

Untuk mencapai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Tabalong, maka diperlukan Sumber Daya yang memadai berupa :

1. Sumber daya yang kompeten
2. Sarana dan prasarana yang memadai

Adapun tabel analisis penggunaan sumber daya disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.14
Analisa penggunaan sumber daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan / Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam anjab sebanyak 42 orang	Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan saat ini sebanyak 31 orang berkurang 9 orang dari tahun sebelumnya karena batas usia pensiun dan jabatan yang tidak terisi	Masih dibutuhkan 6 orang SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan
Tercukupinya sarana prasarana kerja untuk mendukung	Sarana prasarana yang mendukung saat ini belum cukup memadai	Masih membutuhkan sarana dan prasarana	Mengajukan usulan pengadaan barang

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah di capai, telah dilaksanakan kegiatan dan program yang melibatkan beberapa pihak seperti penggunaan pihak ke 3 (tiga), Kementerian, Provinsi, tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai pemateri, tim penilai, pemberi masukan, dan kerja sama dengan pihak

swasta dalam mencapai indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja.

- f. Analisa program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

Untuk mencapai tujuan dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) didukung oleh 9 (Sembilan) program dan 11 (sebelas) kegiatan sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - a. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - a. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
3. Program Pengelolaan Keaneragaman Hayati (kehati)
 - a. Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3):
 - a. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH :
 - a. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran
6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
 - a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
7. Program Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota
8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - a. Kegiatan Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
9. Program Pengelolaan Persampahan.
 - a. Pengelolaan Sampah

Dari 9 (sembilan) Program dan 11 (sebelas) kegiatan tahun 2023 yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong bahwanya program dan kegiatan tersebut sesuai dengan analisis casceding yang telah di lakukan sesuai dari tahun lalu.

**8. Capaian Terhadap Sasaran Strategis 8 :
Meningkatnya Pertumbuhan di Sektor Industri Kecil, Menengah dan Koperasi**

Adapun capaian terhadap sasaran Meningkatnya Pertumbuhan di Sektor Industri Kecil, Menengah dan Koperasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 3.2.15
Meningkatnya Pertumbuhan di Sektor Industri Kecil, Menengah dan Koperasi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d 2024 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Persentase UKM Aktif	Persen	98,84	79	79	100	82	96,34
2.	Persentase Koperasi Aktif	Persen	60	82	59	71,95	86	68,60

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja dari sasaran Meningkatnya Pertumbuhan di Sektor Industri Kecil, Menengah dan Koperasi yaitu Persentase UKM Aktif dengan capaian kinerja tercapai 100 % dikategorikan **Sangat Tinggi**, Persentase Koperasi Aktif dengan capaian kinerja tercapai 71,95 % dikategorikan **Sedang**.

Analisis Persentase UKM Aktif

1. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 , persentase UKM aktif di Kabupaten Tabalong ditargetkan sebesar 79 persen. Pada tahun 2023 persentase UKM yang aktif sebesar 79 persen. Dibandingkan dengan target dalam Perjanjian Kinerja, capaian realisasi kinerja untuk persentase koperasi aktif sebesar 100 persen.

2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022

Di tahun 2022, persentase UKM aktif di Kabupaten Tabalong sebesar 98,84 persen. Sedangkan di tahun 2023, persentase UKM aktif sebesar 79 persen. Sehingga persentase UKM aktif di Kabupaten Tabalong dari tahun 2022 hingga tahun 2023 terjadi penurunan.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target RPJMD Tahun 2019-2024

Realisasi kinerja indikator persentase UKM aktif tahun 2023 sebesar 79 persen. Dibandingkan dengan target akhir pada RPJMD di tahun 2024 sebesar 82 persen, maka capaian kinerja indikator persentase UKM aktif terhadap target RPJMD 2019-2024 hingga tahun 2023 sebesar 96,34 persen.

4. Analisis penyebab keberhasilan

Dalam rangka pencapaian indikator persentase UKM aktif di Kabupaten Tabalong, terdapat beberapa upaya yang dilakukan. Di antaranya melakukan pemetaan masalah, dari hasil tersebut dilakukan pembinaan secara intensif dan penyuluhan sesuai kebutuhan/ permasalahan yang dihadapi UKM sehingga pembinaan yang dilakukan membuahkan hasil.

5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai

Untuk mencapai target persentase UKM aktif di Kabupaten Tabalong, maka diperlukan sumber daya yang memadai berupa :

1. Sumber daya yang kompeten
2. Sarana dan prasarana yang memadai

Tabel 3.2.16
Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/ Kelebihan	Tindak Lanjut
SDM yang diperlukan sesuai persyaratan jabatan dalam analisis jabatan	Terdapat SDM yang belum sesuai persyaratan jabatan saat ini	Masih dibutuhkan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan
Tercukupinya sarana dan prasarana kerja yang mendukung operasional kegiatan	Sarana dan prasarana yang mendukung operasional saat ini belum dapat dipergunakan secara optimal karena terbatasnya biaya operasional yang dibutuhkan	Perlu adanya dukungan dana untuk operasional	Membuat usulan biaya operasional

6. Analisa program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

Dalam upaya pencapaian sasaran Meningkatnya Pertumbuhan di Sektor Industri Kecil, Menengah dan Koperasi di Kabupaten Tabalong dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tabalong

khususnya untuk mendukung Persentase UKM Aktif, didukung oleh 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
 - a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
2. Program Pengembangan UMKM
 - a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.

Analisis Persentase Koperasi Aktif

1. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja
Sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 , persentase koperasi aktif di Kabupaten Tabalong ditargetkan sebesar 82 persen. Pada tahun 2023 di Kabupaten Tabalong persentase koperasi yang aktif sebesar 59 persen. Dibandingkan dengan target dalam Perjanjian Kinerja, capaian realisasi kinerja untuk persentase koperasi aktif sebesar 71,95 persen.
2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022
Di tahun 2022, persentase koperasi aktif di Kabupaten Tabalong sebesar 60 persen. Sedangkan di tahun 2023 , persentase koperasi aktif sebesar 59 persen. Sehingga persentase koperasi aktif di Kabupaten Tabalong dari tahun 2022 hingga tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 1 persen.
3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target RPJMD Tahun 2019-2024

Realisasi kinerja indikator persentase koperasi aktif tahun 2023 sebesar 59 persen. Dibandingkan dengan target akhir pada RPJMD di tahun 2024 sebesar 86 persen, maka capaian kinerja indikator persentase koperasi aktif terhadap target RPJMD 2019-2024 hingga tahun 2023 sebesar 68,60 persen.

4. Analisis penyebab keberhasilan

Dalam rangka pencapaian indikator persentase koperasi aktif di Kabupaten Tabalong, terdapat beberapa upaya yang dilakukan. Di antaranya melakukan pemetaan masalah, dari hasil tersebut dilakukan pembinaan secara intensif dan penyuluhan sesuai kebutuhan/permasalahan yang dihadapi koperasi sehingga pembinaan yang dilakukan membuahkan hasil.

Terhadap kewajiban pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) kepada koperasi diberikan himbauan dan penyuluhan tentang kewajiban RAT. Selain itu untuk koperasi yang belum bisa membuat laporan keuangan diberikan bimbingan teknis pembuatan laporan keuangan secara langsung kepada masing-masing koperasi sehingga koperasi bisa membuat laporan dan dapat melaksanakan RAT. Selama Tahun 2023 jumlah koperasi yang mengadakan RAT adalah sejumlah 34 dari 60 koperasi

5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai

Untuk mencapai target persentase koperasi aktif di Kabupaten Tabalong, maka diperlukan sumber daya yang memadai berupa :

1. Sumber daya yang kompeten
2. Sarana dan prasarana yang memadai

Tabel 3.2.17
Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
SDM yang diperlukan sesuai persyaratan jabatan dalam analisis jabatan	Terdapat SDM yang belum sesuai persyaratan jabatan saat ini	Masih dibutuhkan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan
Tercukupinya sarana dan prasarana kerja yang mendukung operasional kegiatan	Sarana dan prasarana yang mendukung operasional saat ini belum dapat dipergunakan secara optimal karena terbatasnya biaya operasional yang dibutuhkan	Perlu adanya dukungan dana untuk operasional	Membuat usulan biaya operasional

6. Analisa program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

Dalam upaya pencapaian sasaran Meningkatnya Pertumbuhan di Sektor Industri Kecil, Menengah dan Koperasi di Kabupaten Tabalong dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tabalong

khususnya untuk mendukung Persentase Koperasi Aktif, didukung oleh 4 (empat) program dan 4 (empat) kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi dengan Kegiatan :
 - a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi dengan Kegiatan:
 - a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
3. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
 - a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota
4. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
 - a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota.

9. Capaian Terhadap Sasaran Strategis 9 Terkendalinya ketimpangan Pendapatan

Adapun capaian terhadap sasaran Terkendalinya Ketimpangan Pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 3.2.18
Terkendalinya Ketimpangan Pendapatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d 2024
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi %		
1.	Kontribusi perdagangan terhadap PDRB	Persen	6,86	13,89	7,51	54,06	15,29	49,11
2.	Indeks Gini	Indeks	0,377	0,28 – 0,31	0,284	91,61	028 - 031	91,61

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja dari sasaran Terkendalanya Ketimpangan Pendapatan yaitu Kontribusi perdagangan terhadap PDRB dengan capaian kinerja **sangat rendah** dan Indeks Gini dengan capaian kinerja tercapai kinerja **sangat tinggi**.

A. Analisis Capaian Terhadap Target Indikator Kinerja

1. Indikator Kinerja : Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB
 - a) Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2023 untuk Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Tabalong adalah 13,89 persen.
 - b) Pada tahun 2023 , Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Tabalong sebesar 7,51 persen, dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebesar 13,89 persen, sehingga persentase capaian kerjanya sebesar 54,06 persen.
 - c) Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni tahun 2022, Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Tabalong sebesar 6,86 persen, sedangkan di tahun 2023 sebesar 7,51 persen, sehingga dari tahun 2022 hingga 2023 terjadi kenaikan Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB sebesar 0,65 persen.
 - d) Dibandingkan dengan target sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, target akhir pada tahun 2024 untuk Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB sebesar 15,29 persen. Dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 7,51 persen, capaian kinerja terhadap target pembangunan jangka

menengah untuk Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB hingga tahun 2023 sebesar 49,11 persen.

2. Indikator Kinerja : Indeks Gini

a) Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2023 untuk Indeks Gini adalah 0,28 – 0,31.

b) Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong tahun 2023 , Indeks Gini sebesar 0,284 dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebesar 0,28 – 0,31, sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 91,61 persen.

c) Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni di tahun 2022, Indeks Gini terealisasi sebesar 0,377, sedangkan di tahun 2023 sebesar 0,284.

d) Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, target akhir pada tahun 2024 untuk Indeks Gini sebesar 0,28 – 0,31. Dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 0,284, capaian kinerja terhadap target pembangunan jangka menengah untuk Indeks Gini hingga tahun 2023 sebesar 91,61 persen.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Dalam pencapaian sasaran Terkendalinya Ketimpangan Pendapatan, telah dilaksanakan beberapa upaya meliputi sektor perdagangan dan Indeks Gini serta didukung dengan pembangunan maupun pemeliharaan operasional prasarana dan sarana.

Di sektor perdagangan, tahun 2023 fokus pada kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan serta pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan, menjamin ketersediaan, pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, serta penyelenggaraan promosi dagang.

Namun terdapat beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaannya. Pada sarana distribusi perdagangan, banyaknya jumlah pasar yang memerlukan pemeliharaan sehingga anggaran tidak dapat terfokus pada pemenuhan kriteria SNI pada pasar tipe A. Selain itu belum disusunnya SOP pada pengelolaan pasar sehingga sering kali abai terhadap permasalahan yang muncul dan tidak memahami tupoksi masing-masing. Pada informasi harga dan stok bahan pokok, pemantauan informasi harga dan stok bahan pokok dan penting belum bisa dilaporkan lengkap di 12 Kecamatan. Sedangkan pada promosi dagang, belum maksimalnya produk unggulan daerah untuk mencapai standar ekspor.

D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil Kinerja yang telah Dicapai

Untuk mencapai sasaran Terkendalinya Ketimpangan Pendapatan, maka diperlukan sumber daya yang memadai berupa :

1. Sumber daya yang kompeten
2. Sarana dan prasarana yang memadai

Adapun tabel analisis penggunaan sumber daya disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.19
Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/ Kelebihan	Tindak Lanjut
SDM yang diperlukan sesuai persyaratan jabatan dalam analisis jabatan	Terdapat SDM yang belum sesuai persyaratan jabatan saat ini	Masih dibutuhkan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan
Sumber dana yang dapat menuntaskan semua permasalahan dalam pencapaian sasaran berkembangnya agribisnis terpadu yang berkelanjutan	Saat ini sumber dana belum mencukupi dalam pencapaian sasaran sehingga memerlukan biaya dari berbagai sumber baik APBN maupun APBD	Masih membutuhkan sumber dana/anggaran yang dapat mendukung tujuan dan sasaran	Mengusulkan anggaran ke bagian anggaran / TAPD
Tercukupinya sarana dan prasarana kerja yang mendukung operasional kegiatan	Sarana dan prasarana yang mendukung operasional saat ini belum dapat dipergunakan secara optimal karena terbatasnya biaya operasional yang dibutuhkan	Perlu adanya dukungan dana untuk operasional	Membuat usulan biaya operasional

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai, telah dilaksanakan kegiatan dan program yang melibatkan beberapa pihak seperti penggunaan pihak ke 3 (tiga), tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai pemateri, tim penilai, pemberi

masukannya, dan kerja sama dengan pihak swasta dalam mencapai indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja.

b. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Dalam upaya pencapaian sasaran Terkendalinya Ketimpangan Pendapatan, didukung oleh 6 (enam) program dan 12 (dua belas) kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan kegiatan :
 - a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan
 - b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya
2. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, dengan kegiatan :
 - a. Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan
3. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, dengan kegiatan :
 - a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan
 - b. Penerbitan tanda daftar gudang
 - c. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat

4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dengan kegiatan :
 - a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Kabupaten/ Kota
 - b. Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota
5. Program Pengembangan Ekspor, dengan kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.
6. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - b. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - c. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

10. Capaian Terhadap Sasaran Strategis 10:

Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial budaya serta penerapan IPTEK secara optimal

Capaian terhadap Sasaran “Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Sosial Budaya serta Penerapan IPTEK secara Optimal” dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : 3.2.20
Meningkatnya Akses Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan,
Pendidikan Dan Sosial Budaya Serta Penerapan IPTEK Secara
Optimal

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d 2024(%)
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)		
1.	Indeks Pembangunan manusia	Tahun	73,13	74,33	75,43	100,14	75,07	100,47
2.	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,84	70,60	71,28	100,96	70,73	100,28
3.	Rata-rata lama Sekolah	Tahun	9,12	9,69	9,13	94,22	9,93	91,94
4.	Harapan Lama sekolah	Tahun	12,90	14,11	12,91	91,49	14,46	86,29

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 4 (empat) Indikator Kinerja dari Sasaran “Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Sosial Budaya serta Penerapan IPTEK secara Optimal” yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Harapan Lama Sekolah pada tahun 2023 mencapai target. Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75,43 Angka Harapan Hidup sebesar 71,28, Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 9,13, dan Harapan Lama Sekolah sebesar 12,91. Sedangkan Realisasi Capaian yaitu indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia sebesar 100,14 persen, Angka Harapan Hidup sebesar 100,96 persen, Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 94,22 persen, dan Harapan Lama Sekolah sebesar 91,49 persen. Realisasi capaian

ketiga indikator kinerja pada tahun 2023 dikategorikan dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.

Foto 3.2.6
Kegiatan Belajar Paket



A. Analisa Capaian Terhadap Target Indikator Kinerja

1) Indikator Kinerja : Indeks Pembangunan Manusia

- a. Target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Bupati Tabalong tahun 2023 untuk Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tabalong adalah 74,33 pertahun.
- b. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tabalong sebesar 75,43 dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebesar 74,33 pertahun sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 100,14 persen.
- c. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2022 sebesar 73,13 pertahun, Indeks Pembangunan Manusia pada

- tahun 2023 dengan capaian kinerja sebesar 75,43 pertahun artinya hingga tahun 2023 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tabalong setiap tahun semakin meningkat.
- d. Dibandingkan dengan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara Capaian Kinerja Kabupaten Tabalong lebih tinggi dengan capaian kinerja 75,43 pertahun sedangkan Capaian Kinerja Kabupaten Balangan dengan Capaian Kinerja 72,97 pertahun dan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Capaian Kinerja 72,12 pertahun, dapat di artikan Capaian Kinerja Kabupaten Tabalong lebih tinggi.
- e. Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, target akhir pada tahun 2024 untuk Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75,07 tahun. Dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 75,43 tahun, capaian kinerja terhadap target pembangunan jangka menengah untuk Indeks Pembangunan Manusia hingga tahun 2023 sebesar 100,47 persen.
- f. Membandingkan realisasi kinerja dengan Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tabalong dengan capaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia hingga tahun 2023 sebesar 75,43 Tahun, sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 72,11 Tahun maka dapat dikatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tabalong lebih tinggi dari Provinsi

2) Indikator Kinerja : Angka Harapan Hidup

- a. Target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Bupati Tabalong tahun 2023 untuk Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tabalong adalah 70,60 pertahun.
 - b. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong tahun 2023, Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tabalong sebesar 71,28 dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebesar 70,60 pertahun sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 100,96 persen.
 - c. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2022 sebesar 70,84 pertahun, Angka Harapan Hidup pada tahun 2023 dengan capaian kinerja sebesar 71,28 pertahun artinya hingga tahun 2023 Angka Harapan Hidup Kabupaten Tabalong setiap tahun semakin meningkat.
 - d. Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, target akhir pada tahun 2024 untuk Angka Harapan Hidup sebesar 70,73 tahun. Dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 71,28 tahun, capaian kinerja terhadap target pembangunan jangka menengah untuk Angka Harapan Hidup hingga tahun 2023 sebesar 100,28 persen.
- 3) Indikator Kinerja : Rata – Rata Lama Sekolah
- a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2023 untuk Rata – Rata Lama Sekolah di Kabupaten Tabalong adalah 9,69 pertahun.

- b. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong tahun 2023, Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Tabalong sebesar 9,13 dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebesar 9,69 pertahun sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 94,22 persen.
 - c. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2022 sebesar 9,12 pertahun, Rata-Rata Lama Sekolah tahun 2023 dengan capaian kinerja sebesar 9,13 pertahun artinya hingga tahun 2023 Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Tabalong setiap tahun sedikit meningkat.
 - d. Dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, target akhir pada tahun 2024 untuk Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 9,93 pertahun. Dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 9,13 pertahun, capaian kinerja terhadap target pembangunan jangka menengah untuk Rata- Rata Lama Sekolah hingga tahun 2023 sebesar 91,94 persen.
- 4) Indikator Kinerja : Harapan Lama Sekolah
- a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2023 untuk Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tabalong adalah 14,11 pertahun.
 - b. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong tahun 2023, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tabalong tahun 2023 sebesar 12,91 pertahun dibandingkan

- dengan target perjanjian kinerja sebesar 14,11 pertahun sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 91,49 persen.
- c. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2022 sebesar 12,90, Harapan Lama Sekolah dengan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 12,91 artinya hingga tahun 2023 Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tabalong setiap tahun semakin meningkat.
- d. Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, target akhir pada tahun 2024 untuk Harapan Lama Sekolah sebesar 14,46 persen. Dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 12,91 pertahun, capaian kinerja terhadap target pembangunan jangka menengah untuk Harapan Lama Sekolah hingga tahun 2023 sebesar 86,29 persen.

B. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil Kinerja yang Telah Dicapai

- 1) Efisiensi Indikator Angka Harapan Hidup dalam Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil Kinerja yang Telah Dicapai
- Untuk mencapai sasaran Angka Harapan Hidup maka diperlukan sumber daya yang memadai berupa:
- a. Sumber daya yang berkompeten;
 - b. Pendanaan;
 - c. Sarana dan prasarana yang memadai

Berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten Tabalong 2023, jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong beserta jajarannya sejumlah 946 pegawai, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.2.21
Jumlah Pegawai, Kualitas Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural di Dinas Kesehatan, Gudang Farmasi dan Puskesmas Kabupaten Tabalong Tahun 2023

No	Kualifikasi	Jumlah (Orang)
I	Jenjang Pendidikan	
1	SD/Sederajat	7
2	SLTP/Sederajat	12
3	SLTA/Sederajat	31
4	Diploma/Sederajat D1=14, D2=1, D3=232, D4=71	318
5	S1	202
6	S2	23
II	Pangkat/Golongan Ruang	
1	Gol I	2
2	Gol II	121
3	Gol III	423
4	Gol IV	47
III	Pejabat	
1	Struktural	41
2	Non Eselon (Fungsional Umum dan Khusus)	552

Sumber : Laporan LKiJP Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Tahun 2023

Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong telah melakukan kegiatan – kegiatan di antaranya adalah Akreditasi Puskesmas dan mem-BLUD-an Puskesmas sehingga saat ini 18 dari 18 Puskesmas yang ada di Kabupaten Tabalong telah terakreditasi nasional.

Data sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.22
Sarana dan Prasarana Kesehatan Kabupaten Tabalong 2023

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1	Rumah Sakit Umum (PemKab)	1	Tipe C

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	Keterangan
2	Rumah Sakit Umum (Swasta)	1	Tipe C
3	Puskesmas Perawatan	3	
4	Puskesmas Non Perawatan	15	
5	Puskesmas Terakreditasi	18	
6	Puskesmas BLUD	18	
7	Puskesmas Keliling	18	Roda 4
8	Puskesmas Pembantu	43	
9	Poskesdes	113	
10	Gudang Farmasi	1	PemKab
11	Kendaraan Dinas	364	R-2
12	Rumah Dinas Dokter, Dokter gigi dan Paramedis	77	PemKab

Sumber : Laporan LKiJP Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Tahun 2023

Hasil akreditasi puskesmas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.23
Hasil Akreditasi Puskesmas Kabupaten Tabalong Tahun 2023

No	Puskesmas	Hasil Akreditasi	Keterangan
1	Mabu'un	Dasar	2017
2	Muara Harus	Dasar	2017
3	Mungkur Agung	Dasar	2017
4	Pugaan	Madya	2017
5	Kelua	Madya	2018
6	Haruai	Madya	2018
7	Tanta	Madya	2018
8	Bintang Ara	Madya	2018
9	Banua Lawas	Utama	2018

No	Puskesmas	Hasil Akreditasi	Keterangan
10	Upau	Dasar	2018
11	Muara Uya	Madya	2018
12	Jaro	Madya	2019
13	Ribang	Madya	2019
14	Wirang	Madya	2019
15	Tanjung	Madya	2019
16	Hikun (re-akreditasi)	Madya	2019
17	Murung Pudak (re-akreditasi)	Madya	2019
18	Panaan	Madya	2023

Sumber : Laporan LKiJP Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Tahun 2023

Upaya Kesehatan Masyarakat meliputi sistem penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat, komunikasi koordinasi dengan lintas sektor maupun lintas program, pelaksanaan dan evaluasi program di masyarakat. Upaya Kesehatan Perorangan meliputi layanan klinis sesuai standar, obat, laboratorium, peralatan klinis, alat kesehatan sesuai standar, proses peningkatan dan pengembangan kompetensi bagi tenaga klinis.

- 2) Efisiensi Indikator Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah dalam Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil Kinerja yang Telah Dicapai

Untuk mencapai tujuan angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tabalong, maka diperlukan Sumber Daya yang memadai berupa :

- a. Sumber daya yang berkompeten;
- b. Sarana dan prasarana yang memadai

Tabel : 3.2.24
Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan / Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai Persyaratan Jabatan dalam Anjab	Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan saat ini	Masih dibutuhkan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan.
Tercukupinya sarana dan prasarana kerja untuk mendukung	Sarana prasarana yang mendukung saat ini masih belum cukup memadai	Masih membutuhkan sarana dan prasarana	Mengajukan usulan pengadaan barang

Sumber Data: Data Olahan, Tahun 2023

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah di capai, telah dilaksanakan kegiatan dan program yang melibatkan beberapa pihak seperti penggunaan pihak ke 3 (tiga), Tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai pemateri, tim penilai, pemberi masukan, dan kerja sama dengan pihak swasta dalam mencapai indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian kinerja.

C. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Dalam upaya pencapaian Sasaran “Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Sosial Budaya serta Penerapan IPTEK secara Optimal”, di dukung oleh 7 (tujuh) program dan 18 (delapan belas) kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan
 - a. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - c. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 - d. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
2. Program Pengembangan Kebudayaan
 - a. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota
 - b. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota
3. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
 - a. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota
4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
 - b. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
 - c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
 - a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 - c. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 - a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Program dan kegiatan di atas telah menyesuaikan dengan analisis cascading perangkat daerah.

11. Capaian Terhadap Sasaran Strategis 11 Meningkatnya Kesempatan Kerja Terutama Bagi Penduduk Lokal

Capaian terhadap sasaran “Meningkatnya Kesempatan Kerja Terutama Bagi Penduduk Lokal” dapat dilihat pada table berikut:

Tabel : 3.2.25
Meningkatnya Kesempatan Kerja Terutama Bagi Penduduk Lokal

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d 2024 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi %		
1.	Tingkat pengangguran Terbuka	Persen	4,46	3,0-4,0	3,60	90	3.0-4.0	111

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja dari sasaran “Meningkatnya Kesempatan Kerja Terutama Bagi Penduduk Lokal” yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka berhasil melebihi target yang ditetapkan. Realisasi capaian indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,60 persen. Realisasi capaian indikator kinerja ini pada tahun 2023 dikategorikan dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.

Foto 3.2.7
Kegiatan Bimbingan Wira Usaha



A. Analisis Capaian Terhadap Target Indikator Kinerja

Analisis Capaian terhadap Target Indikator Kinerja “Tingkat Pengangguran Terbuka” adalah sebagai berikut :

- a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2023 untuk Tingkat Pengangguran Terbuka adalah 3,0-4,0 persen.
- b. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tabalong adalah 3,60%, dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebesar 3,0-4,0 persen, sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 111 persen.
- c. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka dengan realisasi sebesar 4,46 , artinya hingga tahun 2023 dapat dikatakan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tabalong sebesar 3,60 menurun dari target yang di

harapkan, artinya Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tabalong menurun setiap tahunnya.

- d. Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, target akhir pada tahun 2024 untuk Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3.00-4.00 persen Dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 3,60 persen, capaian kinerja terhadap target pembangunan jangka menengah untuk Tingkat Pengangguran Terbuka hingga tahun 2023 sebesar 111 persen.

- e. Penyebab keberhasilan menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

Adapun upaya yang dilakukan oleh dinas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

1. Minat untuk menjadi peserta Wira Usaha Baru semakin tinggi dan persaingan di bidang perdagangan semakin tinggi.
 2. Meningkatkan jiwa wirausaha dan keahlian di bidangnya sesuai pelatihan yang di berikan
 3. meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
 4. Pelayanan Informasi Ketenagakerjaan melalui Penyebarluasan Informasi Tenaga Kerja.
- f. Analisa efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai

Untuk mencapai tujuan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tabalong, maka diperlukan Sumber Daya yang memadai berupa :

1. Sumber daya yang kompeten
2. Sarana dan prasarana yang memadai

Adapun tabel analisis penggunaan sumber daya disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.26
Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan / Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam anjab sebanyak 46 orang	Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan saat ini sebanyak 34 orang bertambah 3 orang dari kondisi tahun sebelumnya sebanyak 31 orang	Masih dibutuhkan 12 orang SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan
Tercukupinya sarana prasarana kerja untuk mendukung	Sarana prasarana yang mendukung saat ini masih belum cukup memadai	Masih membutuhkan sarana dan prasarana	Mengajukan usulan pengadaan barang

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang dicapai, telah dilaksanakan kegiatan dan program yang melibatkan beberapa pihak seperti penggunaan pihak ke 3 (tiga), tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai pemateri, tim penilai, pemberi masukan, dan kerja sama dengan pihak swasta dalam mencapai indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian kinerja.

g. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

Dalam mencapai target kinerja di atas di dukung oleh 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan yang mendukung dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

- a. Kegiatan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
- b. Kegiatan perluasan dan pengembangan kesempatan kerja

2. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

- a. Kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
- b. Kegiatan peningkatan pelatihan kepada masyarakat
- c. Kegiatan peningkatan produktivitas

persentase tingkat pengangguran terbuka terjadi fluktuasi, yaitu pada tahun 2019 sebesar 3,18 persen turun menjadi 3,07 persen, namun pada tahun 2021 dan 2022 meningkat menjadi 3,43 persen dan 4,46 persen dan pada tahun 2023 ini kembali turun menjadi 3,60 persen.

Pada tahun 2023 angka pengangguran menurun dibandingkan tahun 2022, yang sebesar 6.219 jiwa pada tahun 2022 menjadi 5.052 pada 2023. Demikian juga dengan tingkat pengangguran terbuka turun sebesar 0,86 persen yang pada tahun 2022 sebesar 4,46 persen menjadi 3,60 persen pada tahun 2023.

12. Capaian Terhadap Sasaran Strategis 12**Meningkatnya Kualitas Dan Jangkauan Pelayanan Sosial**

Capaian terhadap Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : 3.2.27
Meningkatnya Kualitas Dan Jangkauan Pelayanan Sosial

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d 2024 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi %		
1.	Persentase PPKS yang dilayani	Persen	88,79	100	96,30	96,30	100	96,30

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja dari sasaran “Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial” adalah Persentase PPKS yang dilayani Kabupaten Tabalong dengan target tahun 2023 sebesar 100 persen, dengan realisasi PPKS yang dilayani di Kabupaten Tabalong sebesar 96,30 persen, Realisasi capaian indikator kinerja ini pada tahun 2023 dikategorikan dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.

Analisis Capaian Terhadap Target Indikator Kinerja

1. Indikator Kinerja : Persentase PPKS yang dilayani

- a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2023 untuk Persentase PPKS yang dilayani di Kabupaten Tabalong adalah 100 persen.
- b. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Tahun 2023, Persentase PPKS yang dilayani sebesar 96,30 persen, dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebesar 100 persen.

- c. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tahun 2022 persentase PPKS (sebelumnya disebut PMKS) yang sebesar 88,79 persen dengan target di Perjanjian Kinerja sebesar 100 persen, pada tahun 2023 Persentase PPKS yang dilayani dengan realisasi sebesar 96,30 persen, dengan target di Perjanjian Kinerja sebesar 100 persen.
- d. Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong tahun 2019-2024 untuk PPKS yang dilayani targetnya 100 persen dengan realisasi 96,30 persen
- e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai

Untuk mencapai tujuan Persentase PPKS yang Mandiri di Kabupaten Tabalong, maka diperlukan Sumber Daya yang memadai berupa :

1. Sumber daya yang kompeten
2. Sarana dan prasarana yang memadai

Tabel : 3.2.28
Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan / Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai Persyaratan Jabatan dalam Anjab sebanyak 74 orang	Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan saat ini sebanyak 25 orang	Masih dibutuhkan 48 orang SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar pelaksanaan pekerjaan

			dapat berjalan.
Tercukupinya sarana dan prasarana kerja untuk mendukung	Sarana prasarana yang mendukung saat ini masih belum cukup memadai	Masih membutuhkan sarana dan prasarana	Mengajukan usulan pengadaan barang
Sumber dana yang dapat menuntaskan semua permasalahan	Saat ini sumber dana dapat mencukupi penanganan masalah PMKS	Masih membutuhkan sumber dana/anggaran yang dapat mendukung tujuan dana dan sasaran dinas	Mengajukan usulan ke tingkat pusat baik melalui dana alokasi khusus ataupun APBN

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai, telah dilaksanakan kegiatan dan program yang melibatkan beberapa pihak seperti penggunaan pihak ke 3 (tiga), tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai pemateri, tim penilai, pemberi masukan, dan kerja sama dengan pihak swasta dalam mencapai indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja.

- f. Analisa program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

Dalam mendukung sasaran kinerja di atas, dilaksanakan 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan yang mendukung dalam Persentase PPKS yang Mandiri sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 - a. Kegiatan peningkatan Pemberdayaan PSKS
 - b. Kegiatan peningkatan pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat

- c. Kegiatan peningkatan penanganan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan restorasi sosial dan pengelolaan sumber dana sosial

Analisis terhadap program dan kegiatan di atas untuk dapat merampingkan program yang harus di laksanakan 1 (satu) orang pejabat eselon III dan 1 (satu) orang untuk kegiatan pejabat subkoordinator, agar nantinya kegiatan yang tujuannya sama bisa di gabung, atau kegiatan yang tidak relevan lagi di hapus, sesuai dengan analisis cascading Perangkat Daerah.

g. Solusi dalam menurunkan angka PPKS

1. Dinas Sosial Kabupaten Tabalong telah melaksanakan berbagai Program dalam upaya menurunkan angka PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).
2. Program-program yang mendukung kegiatan tersebut adalah:
 - a. Bantuan Korban pasca bencana
 - b. Bantuan Sosial pangan daerah (BPNT)
 - c. Bantuan UEP Dana Investasi Daerah
 - d. Bantuan Sosial AKSK (Paket sembako)
 - e. Bantuan Sembako PKH fakir miskin
 - f. Lansia terlantar di PSTW
 - g. Tunanetra di PSBN
 - h. Penyandang Cacat Potensial ke Solo
 - i. ASLUT (Asistensi Lanjut Usia Terlantar) dana di KBPKAD
 - j. ODKB (Orang Dengan Kecacatan Berat)

- k. Anak terlantar PSBR
- l. WRSE (Wanita Rawan Sosial Ekonomi)
- m. Lansia kurang mampu
- n. Anak fakir miskin/terlantar di PSAA
- o. Orang terlantar dalam daerah
- p. Orang terlantar luar daerah
- q. Anak nakal
- r. Panti Non Panti
- s. Rutilahu (Rumah tidak layak huni).

13. Capaian Terhadap Sasaran Strategis 13 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian terhadap Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : 3.2.29
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d 2024 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi %		
1.	Indeks Pemberdayaan Genders (IDG)	Point	74,65	74,25	74,60	100,47	75,12	99,30
2.	Indeks pembangunan Gender (IPG)	Point	85,48	85,91	86,06	100,17	86,10	99,95

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 (dua) indikator kinerja sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu Indeks Pemberdayaan Genders (IDG) melebihi target dengan realisasi 74,60 persen, Indeks Pembangunan Gender (IPG)

dengan realisasi 86,06 persen, untuk 2 (dua) indikator kinerja tersebut dengan capaian kinerja sebesar 100,47 persen dan 100,17 persen sehingga masuk skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**. Foto di bawah ini kegiatan yang menunjang pelaksanaan sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

Foto.3.2.8
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PUG MELALUI PPRG BAGI SKPD
TAHUN 2023 (IDG)



A. Analisis Capaian Terhadap Indikator Kinerja

1. Indikator Kinerja : Indeks Pemberdayaan Genders (IDG)
 - a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2023 untuk Indeks Pemberdayaan Genders (IDG) di Kabupaten Tabalong adalah 74,25 persen.
 - b. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Indeks Pemberdayaan Genders (IDG) di Kabupaten Tabalong adalah

- 74,60 persen dibandingkan dengan target sebesar 74,25 persen sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 100,47 persen.
- c. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2022, Indeks Pemberdayaan Genders (IDG) dengan capaian kinerja 74,65 persen dan untuk tahun 2023 sebesar 74,60 persen.
- d. Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024, target akhir pada tahun 2024 untuk Indeks Pemberdayaan Genders (IDG) sebesar 75,12 persen. Dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 74,60 persen, capaian kinerja terhadap target pembangunan jangka menengah untuk Indeks Pemberdayaan Genders (IDG) hingga tahun 2023 sebesar 99,30 persen.

2. Indikator Kinerja: Indeks Pembangunan Gender (IPG)

- a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2023 untuk Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Tabalong adalah 85,91 persen.
- b. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Target Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Tabalong Tahun 2023 sebesar 86,06 persen, dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebesar 85,91 persen sehingga persentasenya sebesar 100,17 persen.

- c. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Gender dengan capaian kinerja 85,48 persen, dan tahun 2023 dengan capaian kinerja 86,06 persen artinya Indeks Pembangunan Gender (IPG) makin meningkat.
- d. Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, target akhir pada tahun 2024 untuk Indeks Pembangunan Gender 86.10 persen. Dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 86,06 persen, capaian kinerja terhadap target pembangunan jangka menengah untuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) hingga tahun 2023 sebesar 99,95 persen.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

- a. Realisasi Indeks Pemberdayaan Genders (IDG) tahun 2023 melebihi target dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) realisasi tahun 2023 kurang dari target, hal ini dikarenakan keberhasilan melalui cara meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi serta pendampingan kelompok perempuan di perdesaan dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui pemberdayaan ekonomi keluarga dan keterlibatan perempuan dalam parlemen, sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan, dapat di artikan Indeks Pemberdayaan Genders (IDG) Kabupaten Tabalong meningkat.
- b. Adanya kerjasama yang baik dengan lintas sektor yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati tentang Tim Peningkatan Kualitas

Keluarga Daerah (TPK2D) meliputi Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga, Ketahanan Fisik, Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Sosial-Psikologi, dan Ketahanan Sosial-Budaya.

- c. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam mendukung peningkatan kualitas keluarga terlihat dalam aktifnya kader dalam mengikuti pembinaan dari tiap Perangkat Daerah yang terkait serta mengaplikasikannya dalam kegiatan sehari-hari.
- d. Untuk data IPG dan IDG tiap tahun nya masih menunggu rilis dari BPS Pusat yang biasanya keluar sekitar triwulan kedua tiap tahunnya sehingga mengalami keterlambatan apabila Perangkat Daerah lain meminta data kepada Dinas P3AP2KB, jadi menggunakan data tahun sebelumnya.
- e. Untuk jumlah Perangkat Daerah yang responsif gender, Dinas P3AP2KB tiap tahunnya melaksanakan Workshop/Bimtek PUG Melalui PPRG kepada semua Perangkat Daerah di Kabupaten Tabalong, tetapi masih ada beberapa Perangkat Daerah yang belum melaksanakan PPRG dengan tidak mengumpulkan analisis GAP dan GBS di Perangkat Daerah nya.
- f. Selain itu Dinas P3AP2KB bekerja sama dengan BKPSDM mengadakan Kegiatan Training of Trainer Pengarusutamaan Gender (TOT PUG) bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 mulai tanggal 27 Nopember sampai dengan 1 Desember 2023 selama 5 (lima) hari bertempat di Hotel Jelita Tanjung

C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil Kinerja yang telah Dicapai

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka diperlukan sumber daya yang memadai berupa :

- 1) Sumber daya yang kompeten
- 2) Sarana dan prasarana yang memadai

Adapun tabel analisis penggunaan sumber daya disajikan sebagai berikut :

Tabel : 3.2.30
Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan / Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam anjab sebanyak 71 orang	Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan saat ini sebanyak 27 orang.	Masih dibutuhkan 44 orang SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengusulkan untuk pengisian jabatan yang kosong dan mengusulkan untuk formasi pengangkatan ASN
Tercukupinya sarana prasarana kerja untuk mendukung	Sarana prasarana yang mendukung saat ini belum cukup memadai	Masih membutuhkan sarana dan prasarana	Mengajukan usulan pengadaan barang

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah di capai, telah dilaksanakan kegiatan dan program yang melibatkan beberapa pihak seperti penggunaan pihak

ke 3 (tiga), tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai pemateri, tim penilai, pemberi masukan, dan kerja sama dengan pihak swasta dalam mencapai indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja.

D. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Untuk mencapai tujuan dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) didukung oleh 2 (dua) program dan 6 (enam) kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Perempuan yang Berkeadilan Gender:
 - a. Kegiatan Peningkatan kualitas hidup perempuan dalam bidang ekonomi
 - b. Peningkatan kualitas hidup perempuan bidang sosial, politik dan hukum
 - c. Peningkatan kualitas keluarga dan sistem data informasi
2. Program Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak:
 - a. Kegiatan Peningkatan pemenuhan hak anak
 - b. Kegiatan Pelayanan pengaduan bagi perempuan dan anak
 - c. Kegiatan Peningkatan perlindungan hak perempuan

program dan kegiatan di atas telah sesuai dengan analisis cascading Perangkat Daerah.

14. Capaian Terhadap Sasaran Strategis 3 Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Capaian terhadap menurunnya tingkat kemiskinan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel : 3.2.31
Menurunnya Tingkat Kemiskinan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d 2024 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi %		
1.	Persentase Penduduk Miskin	%	5,87	5,60	5,77	97,05	5,55	96,18

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja dari sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan yaitu indikator kinerja Persentase Penduduk Miskin tidak mencapai target. Realisasi capaian realisasi indikator kinerja Menurunnya Tingkat Kemiskinan sebesar 5,77 persen realisasi capaian indikator kinerja ini pada tahun 2023 dikategorikan dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.

Foto 3.2.9
Kegiatan Pemberian Paket Usaha Dan Bantuan Bahan Pokok



A. Analisis Capaian Terhadap Target Indikator Kinerja

1) Indikator Kinerja: Persentase Penduduk Miskin

- a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2023 untuk Persentase Penduduk Miskin adalah 5,60 persen.
- b. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong Tahun 2023 , Persentase Penduduk Miskin sebesar 5,77 persen , dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebesar 5,60 persen, sehingga persentase capaian kinerjanya **sebesar 96,91 persen**.
- c. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2023 Persentase Penduduk Miskin dengan capaian kinerja 5,77 persen, sedangkan tahun 2022 capaian kinerja 5,87 persen artinya hingga tahun 2023 dapat dikatakan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tabalong ada pengurangan.
- d. Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, target akhir pada tahun 2024 untuk Persentase Penduduk Miskin sebesar 5,55 persen. Dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 5,77 persen, capaian kinerja terhadap target pembangunan jangka menengah untuk Persentase Penduduk Miskin hingga tahun 2023 sebesar 96,18 persen.
- e. Membandingkan realisasi kinerja dari tahun ketahun Kabupaten Tabalong dengan capaian kinerja Persentase Penduduk Miskin dari tahun 2018 sd 2023 , adanya perubahan yang tidak signifikan terhadap Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tabalong, seperti table berikut :

Tabel 3.2.32
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tabalong
Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (PO)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Tabalong	6.01	5.72	6.27	5,87	5,77

Data BPS Tabalong

Dari tingkat kemiskinan di kabupaten Tabalong juga di pengaruhi adanya perubahan perhitungan tiap tahun terhadap garis kemiskinan yang di tetapkan oleh pemerintah pusat, seperti tabel berikut :

Tabel 3.2.33
Kemiskinan Kabupaten Tabalong
Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan (Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023*)
Tabalong	463.980	531.180	542,800	573.018	615.912

Data BPS Tabalong

- f. Analisa efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai

Untuk mencapai tujuan Persentase Penduduk miskin di Kabupaten Tabalong, maka diperlukan Sumber Daya yang memadai berupa :

- a. Sumber daya yang kompeten
- b. Sarana dan prasarana yang memadai

Tabel : 3.2.34
Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan / Kelebihan	Tindak Lanjut

Jumlah SDM sesuai Persyaratan Jabatan dalam Anjab sebanyak 49 orang	Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan saat ini sebanyak 32 orang	Masih dibutuhkan 8 orang SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan.
Tercukupinya sarana dan prasarana kerja untuk mendukung	Sarana prasarana yang mendukung saat ini masih belum cukup memadai	Masih membutuhkan sarana dan prasarana	Mengajukan usulan pengadaan barang

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai, telah dilaksanakan kegiatan dan program yang melibatkan beberapa pihak seperti penggunaan pihak ke 3 (tiga), tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai pemateri, tim penilai, pemberi masukan, dan kerja sama dengan pihak swasta dalam mencapai indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian kinerja.

- g. Analisa program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait mewujudkan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Tabalong pada tahun 2023, sebanyak 3 (Tiga) program dengan 11 (Sebelas) kegiatan yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini yaitu

:

- a) Program Perumahan Rakyat dan PSU Perumahan
1. Kegiatan perencanaan dan pendataan perumahan

2. Kegiatan penyediaan dan pelaksanaan perumahan
- b) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
1. Kegiatan Perlindungan sosial, bencana alam dan bencana sosial
 2. Kegiatan Jaminan sosial keluarga
 3. Kegiatan Penanganan fakir miskin perkotaan dan pedesaan
- c) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1. Kegiatan Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar
 2. Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi tuna social
 3. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi wanita rawan sosial ekonomi
 4. Peningkatan pelayanan lansia kurang mampu
 5. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan trauma
- h. Identifikasi wilayah miskin di Kabupaten Tabalong

Dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tabalong, jumlah jiwa miskin tertinggi ada pada Kecamatan Banua Lawas, Kecamatan Kelua dan Kecamatan Muara Uya. Hasil identifikasi terhadap wilayah dengan jumlah jiwa miskin tertinggi tersebut di atas dipengaruhi oleh faktor-faktor :

1. Pertumbuhan jumlah penduduk yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain, sehingga memberi dampak terhadap penanganan kemiskinan menjadi lebih lebih kompleks;
2. Potensi perekonomian wilayah yang sebagian besar didominasi oleh sektor pertanian dan menjadi mayoritas menjadi lapangan

- pekerjaan utama, sehingga terjadinya perlambatan pada sektor pertanian memberi dampak terhadap peningkatan kemiskinan;
3. Kategori jumlah penduduk dengan usia tidak produktif (golden age) yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain, sehingga upaya penanganan kemiskinan kurang berhasil;
 4. Merupakan daerah yang berada di perbatasan perkotaan dan di wilayah perdesaan sehingga rentan terhadap persaingan, perubahan dan dinamika perekonomian.
- i. Adapun permasalahan yang terjadi dalam pengurangan persentase penduduk miskin yang ada di Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut :
1. Kurang optimalnya sinergitas program penanggulangan kemiskinan;
 2. Masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengembangkan potensinya untuk meningkatkan pendapatan dan mengatasi masalah kemiskinannya;
 3. Kualitas dan kuantitas sarana prasarana produksi usaha ekonomi masyarakat miskin yang kurang memadai.
- j. Solusi yang akan dilaksanakan dari tahun ketahun adalah sebagai berikut :
1. Optimalisasi fungsi kelembagaan penanggulangan kemiskinan ;
 2. Meningkatkan program pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi yang berbasis wilayah dan ekonomi lokal;

3. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dengan memanfaatkan potensi lokal;
4. Pembangunan infrastruktur untuk mendorong akses terhadap layanan publik dan pasar yang lebih baik bagi masyarakat di kawasan pedesaan.

15. Capaian Terhadap Sasaran Strategis 15 Meningkatnya Pengelolaan Dan Kinerja Pemerintah Daerah Serta Kualitas Pelayanan Publik

Adapun capaian terhadap sasaran Meningkatkan Pengelolaan Dan Kinerja Pemerintah Daerah Serta Kualitas Pelayanan Publik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 3.2.35
Meningkatnya Pengelolaan Dan Kinerja Pemerintah Daerah Serta Kualitas Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Realisasi 2022 (%)	2023			Target Akhir RPJMD (2020)	Capaian s/d 2024 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi %		
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	katagori	58,10	80	77,53	96,91	82	94,54
2.	Nilai SAKIP	katagori	B	BB	B	B	A	B
3.	Opini BPK	Pridikat	WTP	WTP	WTP	n.a	WTP	WTP
4.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik	Nilai	84,55	85	84,47	99,37	85	99,37
5.	Tingkat Kemandirian Daerah	tingkat	14,28	16,58	11,13	67,12	17,17	64,82

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 5 (lima) indikator kinerja dari sasaran Meningkatnya pengelolaan dan kinerja pemerintah daerah serta kualitas pelayanan publik yaitu indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi dengan capaian kinerja **Sangat Tinggi** dan Predikat SAKIP capaian kinerjanya belum tercapai dan Opini BPK pada tahun 2023 data kinerja belum rilis oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sedangkan untuk capaian kinerja 2 (dua) indikator kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik dengan capaian kinerja **Sangat Tinggi** dan Tingkat Kemandirian Daerah dikategorikan dengan skala nilai perangkat kinerja **sedang**.

A. Analisis Capaian Terhadap Target Indikator Kinerja

1) Indikator Kinerja : Indeks Reformasi Birokrasi

- a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2023 untuk Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Tabalong adalah 80.
- b. Berdasarkan data dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2023 , Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tabalong dengan capaian kinerja sebesar 77,53 dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebesar 80, sehingga persentase capaian kinerjanya 96,91%.
- c. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2022, Indeks Reformasi Birokrasi dengan capaian kinerja 58,10 sedangkan tahun 2023 capaian kinerja 77,53 maka dapat

dikatakan adanya peningkatan terhadap Indeks Reformasi Birokrasi.

- d. Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, target akhir pada tahun 2024 untuk Indeks Reformasi Birokrasi adalah 82. Dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 77,53 sehingga persentase capaian kinerjanya 94,54%.

2) Indikator Kinerja : Predikat SAKIP

- a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2023 untuk Predikat SAKIP di Kabupaten Tabalong adalah BB.
- b. Berdasarkan data dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2023, Predikat SAKIP Kabupaten Tabalong dengan capaian kinerja sebesar B dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebesar BB, sehingga persentase capaian kinerjanya B.
- c. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2022, Predikat SAKIP dengan capaian kinerja B untuk tahun 2023 capaian kinerja B untuk nilai ada penurunan dari tahun 2022 sebesar 68,37 di tahun 2023 sebesar 67,48.
- d. Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, target akhir pada tahun 2024 untuk Predikat SAKIP adalah A. Dengan realisasi pada tahun 2023 B.

3) Indikator Kinerja : Opini Badan Pemeriksa Keuangan

- a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2023 untuk Opini Badan Pemeriksa Keuangan Kabupaten Tabalong adalah WTP.
 - b. Pada tahun 2023 Opini Badan Pemeriksa Keuangan untuk Kabupaten Tabalong tahun 2023 belum rilis dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
 - c. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2022, Opini Badan Pemeriksa Keuangan dengan capaian kinerja Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan realisasi tahun 2023 belum rilis dari Badan Pemeriksa Keuangan.
 - d. Dibandingkan dengan target sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, target akhir pada tahun 2024 untuk Opini Badan Pemeriksa Keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Karena data Opini Badan Pemeriksa Keuangan belum rilis maka data tidak bisa di bandingkan.
- 4) Indikator Kinerja : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik
- a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2023 untuk Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Kabupaten Tabalong adalah 85.
 - b. Pada tahun 2023 berdasarkan data dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2023 , Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik

Kabupaten Tabalong adalah 84,47, dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebesar 85, sehingga persentase capaian kinerjanya 99,37%.

- c. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2022, Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik dengan capaian kinerja 84,55, sedangkan tahun 2023 capaian kinerja 84,47 maka dapat dikatakan adanya penurunan terhadap pelayanan terhadap masyarakat.
- d. Dibandingkan dengan target sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, target akhir pada tahun 2024 untuk Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik sebesar 85, Dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 84,47 sehingga persentase capaian kinerjanya 99,37%.

5) Indikator Kinerja : Tingkat Kemandirian Daerah

- a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2023 untuk Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Tabalong adalah 16,58.
- b. Pada tahun 2023 berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong tahun 2023, Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Tabalong adalah 11,13, dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebesar 16,58 sehingga persentase capaian kinerjanya 67,12%.

- c. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2022, Tingkat Kemandirian Daerah dengan capaian kinerja 14,28 sedangkan tahun 2023 capaian kinerja 11,13 maka dapat dikatakan adanya penurunan terhadap Tingkat Kemandirian Daerah kabupaten Tabalong
- d. Dibandingkan dengan target sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, target akhir pada tahun 2024 untuk Tingkat Kemandirian Daerah sebesar 17,17. Dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 11,13 sehingga persentase capaian kinerjanya 64,82 %.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya pengelolaan dan kinerja pemerintah daerah serta kualitas pelayanan publik yaitu indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi, Predikat SAKIP, Opini BPK, Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik dan Tingkat Kemandirian Daerah telah dilaksanakan beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Dilaksanakannya Penguatan SAKIP untuk semua Perangkat Daerah
- b. Dilaksanakannya Penguatan Reformasi Birokrasi untuk semua Perangkat Daerah
- c. Menyebarkan segala informasi tentang SAKIP kepada seluruh (PD) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong
- d. Melaksanakan sistem akuntansi berbasis akrual

- e. Tata kelola keuangan daerah yang sesuai standar
- f. Penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu
- g. Menyampaikan dan menetapkan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tepat waktu
- h. Melaksanakan wokshop terhadap pelayanan public
- i. Melakukan inovasi-inovasi dalam mencapai target pendapatan daerah dll.

C. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Analisa program dan kegiatan yang ingin di capai dalam sasaran Meningkatnya pengelolaan dan kinerja pemerintah daerah serta kualitas pelayanan publik yaitu indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi, Predikat SAKIP, Opini BPK, Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik dan Tingkat Kemandirian Daerah pada tahun 2023 , dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program pengelolaan penganggaran keuangan daerah
 - a. Penyusunan rencana anggaran daerah
 - b. Pelaksanaan evaluasi anggaran daerah
 - c. Pengelolaan data informasi daerah
2. Program pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan daerah.
 - a. Pengelolaan belanja daerah
 - b. Pengelolaan administrasi perbendaharaan belanja pegawai
 - c. Pengelolaan kas daerah

3. Program peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah
 - a. Rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan daerah
 - b. Analisa dan pengolahan sistem Akuntansi SKPD dan SKPKD
 - c. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja Aparatur
 - a. Kegiatan Penguatan Sakip Kabupaten Tabalong
5. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
 - a. Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
 - b. Kegiatan Pelaksanaan SATGAS sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)
 - c. Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
 - d. Kegiatan pengawasan/monitoring pemotongan dan penyetoran pajak dan retribusi
 - e. Kegiatan Penyelenggaraan TPTGR
 - f. Kegiatan Pelaksanaan pengawasan non PKPT
 - g. Kegiatan Sinergitas pengawalan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah
 - h. Kegiatan unit laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara
 - i. Kegiatan Unit pengendali gratifikasi
 - j. Kegiatan Koordinasi/supervisi pencegahan korupsi daerah.

D. Analisa efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai

Untuk mencapai sasaran meningkatnya pengelolaan dan kinerja pemerintah daerah serta kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tabalong, maka diperlukan Sumber Daya yang memadai berupa :

1. Sumber daya yang kompeten
2. Sarana dan prasarana yang memadai

Adapun tabel analisis penggunaan sumber daya disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.36
Analisa penggunaan sumber daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan / Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam anjab sebanyak 10 orang	Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan saat ini	Masih dibutuhkan 5 orang SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan
Tercukupinya sarana prasarana kerja untuk mendukung	Sarana prasarana yang mendukung saat ini belum cukup memadai	Masih membutuhkan sarana dan prasarana	Mengajukan usulan pengadaan barang

3.3 Akuntabilitas Anggaran Tahun 2023

1. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan pada tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.1.

Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2023

No.	Jenis Pendapatan	Rencana (Rp)		Realisasi (Rp)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
	PENDAPATAN	1.776.967.497.814,00	2.188.119.555.579,00	2.403.029.681.321,79
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	204.958.186.337,00	221366.950.013,00	256.804.852.375,79
-	Pendapatan pajak Daerah	80.230.793.273,00	80.324.631.00,00	92.607.474.468,00
-	Pendapatan Retribusi Daerah	6.808.960.192,00	5.642.572.300,00	5.935.871.681,00
-	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.944.300.000,00	14.804.871.000,00	14.804.871.371,00
-	Lain- lain PAD Yang Sah	100.974.132.872,00	120.594.875.712,00	143.456.634.855,79
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.452.009.311.477,00	1.966.752.605.566,00	2.142.262.619.525,00
-	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.323.872.059.000,00	1.621.743.146.247,00	1.781.162.367.410,00

-	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		143.531.414.000,00	143.531.414.000,00
-	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	128.137.252.477,00	201.478.045.292,00	217.568.838.115,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	120.000.000.000,00	0,00	3.962.209.421,00
-	Pendapatan Hibah	120.000.000.000,00	0,00	3.962.209.421,00
-	Pendapatan lainnya	0,00	0,00	0,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2023
(Unaudited)

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.403.029.681.321,79 atau mencapai 109,82% dari estimasi pendapatan yang dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp2.188.119.555.579,00. Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

- 1) Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp256.804.852.375,79 dari estimasi pendapatan setelah perubahan sebesar Rp221.366.950.013,00 atau sebesar 116,01%. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD Yang Sah.

- 2) Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 sebesar Rp2.142.262.619.525,00 dari estimasi pendapatan setelah perubahan sebesar Rp1.966.752.605.566,00 atau 108,92%. Pendapatan transfer tersebut bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya.
- 3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah merupakan pendapatan hibah dan pendapatan lainnya, dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp3.962.209.421,00 dari estimasi pendapatan setelah perubahan sebesar Rp0,00.

2. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi belanja menurut jenis belanja pada tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.2

Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2023

No.	Jenis Belanja	Rencana (Rp)		Realisasi (Rp)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5
	BELANJA	1.837.050.831.630,00	2.640.861.889.260,00	2.296.370.148.723,00
1	BELANJA OPERASI	1.248.375.407.339,00	1.541.104.029.285,00	1.338.755.146.383,00
-	Belanja Pegawai	701.094.993.538,00	647.015.250.755,00	579.068.238.882,00
-	Belanja Barang dan Jasa	488.633.969.852,00	762.211.599.550,00	658.935.405.303,00
-	Belanja Subsidi	0,00	1.370.000.000,00	276.630.000,00
-	Belanja Bunga	6.529.955.000,00	6.529.955.000,00	5.627.370.152,00

-	Belanja Hibah	32.323.088.949,00	68.324.904.980,00	67.523.402.046,00
-	Belanja Bantuan Sosial	19.793.400.000,00	28.634.319.000,00	27.324.100.000,00
2	BELANJA MODAL	349.869.643.933,00	814.127.548.199,00	681.688.599.520,00
-	Belanja modal Tanah	24.304.121.732,00	67.156.766.985,00	42.213.476.517,00
-	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.921.008.103,00	169.869.386.553,00	153.302.712.171,00
-	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	75.479.805.077,00	117.134.607.684,00	101.181.296.253,00
-	Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	201.684.452.145,00	449.850.467.585,00	375.548.173.127,00
-	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.683.256.876,00	8.846.419.392,00	8.391.939.750,00
-	Belanja Modal Aset Lainnya	797.000.000,00	1.269.900.000,00	1.051.001.702,00
3	BELANJA TAK TERDUGA	17.554.293.358,00	11.327.774.776,00	1.624.000.000,00
-	Belanja Tak Terduga	17.554.293.358,00	11.327.774.776,00	1.624.000.000,00
	TRANSFER	221.251.487.000,00	274.302.537.000,00	274.302.402.820,00
1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	8.709.000.000,00	8.709.000.000,00	8.709.000.000,00

-	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	8.026.000.000,00	8.116.500.002,00	8.116.500.002,00
-	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	683.000.000,00	592.499.998,00	592.499.998,00
2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	212.542.487.000,00	265.593.537.000,00	265.593.402.820,00
-	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	212.542.487.000,00	265.593.537.000,00	265.593.402.820,00
-	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		0,00	0,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2023 (Unaudited).

Belanja merupakan semua pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Realisasi belanja pada tahun 2023 sebesar Rp2.296.370.148.723,00 dari rencana belanja setelah perubahan sebesar Rp2.640.861.889.260,00 atau sebesar 86,96%. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan transfer, dengan realisasi sebagai berikut :

1) Realisasi belanja operasi tahun 2023 sebesar Rp1.338.755.146.383,00 atau 86,87% dari rencana belanja setelah perubahan sebesar Rp1.541.104.029.285,00. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, bantuan bantuan sosial.

- 2) Realisasi belanja modal tahun 2023 sebesar Rp681.688.599.520,00 atau 83,73% dari rencana belanja setelah perubahan sebesar Rp814.127.548.199,00. Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan Gedung, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja modal aset tetap lainnya.
- 3) Realisasi belanja tidak terduga tahun 2023 sebesar Rp1.624.000.000,00 atau 14,34% dari rencana belanja setelah perubahan sebesar Rp11.327.774.776,00.
- 4) Realisasi transfer tahun 2023 sebesar Rp274.302.402.820,00 atau 100% dari rencana belanja setelah perubahan sebesar Rp274.302.537.000,00. Belanja transfer terdiri dari transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan.
 - a. Realisasi transfer bagi hasil pendapatan tahun 2023 sebesar Rp8.709.000.000,00 atau 100% dari rencana belanja setelah perubahan sebesar Rp8.709.000.000,00. Transfer bagi hasil pendapatan terdiri dari transfer bagi hasil pajak daerah dan transfer bagi hasil retribusi daerah.
 - b. Realisasi transfer bantuan keuangan tahun 2023 sebesar Rp265.593.402.820,00 atau 100% dari rencana belanja setelah perubahan sebesar Rp265.593.537.000,00. Transfer bantuan keuangan terdiri dari transfer bantuan keuangan ke desa dan transfer bantuan keuangan lainnya.

3. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan pada tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.3

Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan Tahun Anggaran 2023

No.	Jenis Pembiayaan	Rencana (Rp)		Realisasi (Rp)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
	PEMBIAYAAN			0,00
1	PENERIMAAN DAERAH	102.119.796.815,00	495.378.796.681,00	495.378.796.680,86
-	Penggunaan Sisa Lebih Anggaran (SiLPA)	102.119.796.815,00	495.378.796.681,00	495.378.796.680,86
-	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
2	PENGELUARAN DAERAH	42.036.463.000,00	42.636.463.000,00	41.752.349.487,00
-	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	21.536.463.000,00	22.136.463.000,00	22.136.463.000,00
-	Pembayaran Pokok Utang	20.500.000.000,00	20.500.000.000,00	19.615.886.487,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2023
(Unaudited)

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan daerah terdiri dari

Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Realisasi penerimaan daerah tahun 2023 sebesar Rp495.378.796.680,86 atau sebesar 100% dari rencana penerimaan setelah perubahan sebesar Rp495.796.681,00. Penerimaan Daerah pada tahun 2023 merupakan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Penerimaan Pinjaman Daerah.
- 2) Realisasi Pengeluaran daerah tahun 2023 sebesar Rp41.752.349.487,00 atau sebesar 97,93% dari rencana pengeluaran daerah setelah perubahan sebesar Rp 42.636.463.000,00.

3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dengan hasil kinerja yang telah dicapai

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2023 sebesar 13,04%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran. Jika dilihat dari efisiensi anggaran Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2023, efisiensi anggaran terbesar pada Realisasi belanja modal tahun 2023 sebesar Rp681.688.599.520,00 atau 83,73% dari rencana belanja setelah perubahan sebesar Rp 814.127.548.199,00.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jbaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2023, disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Tabalong telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 15 (lima belas) sasaran strategis, 27 (dua puluh tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/034/2021 tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 27 indikator kinerja utama Bupati tahun 2023, disimpulkan bahwa 21 (dua puluh satu) indikator kinerja

yang berkriteria pengukuran nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**, 4 (empat) indikator kinerja yang berkriteria pengukuran nilai perangkat kinerja **sedang**, dan 1 (satu) indikator kinerja yang berkriteria pengukuran nilai perangkat kinerja **Sangat Rendah** dan 1 indikator belum riliss, dengan demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja utama yang capaiannya belum seperti yang diharapkan sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja dalam Surat Keputusan Bupati Tabalong khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Sedangkan untuk indikator sasaran yang belum tercapai Pemerintah Kabupaten Tabalong tetap optimis dengan sisa waktu sampai akhir tahun dapat tercapai secara keseluruhan. Upaya perbaikan kedepan dalam menjawab tantangan pembangunan dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan dengan tetap fokus pada monitoring dan evaluasi pelaksanaan program-program pendukung sasaran daerah.